

Pola Migrasi Pekerja Migran Sumenep ke Arab Saudi dan Malaysia dan Dampaknya bagi Lembaga Sosial Ekonomi Daerah Asal

Migration Patterns of Sumenep People to Saudi Arabia and Malaysia and Its Impact on Social Economic Institution in the Place of Origin

Gunanto Surjono,¹ Sunyoto Usman,² Pujo Semedi Hargo Yuwono,³

(1) Mahasiswa S-3 (Doktor) Program Studi Sosiologi Fisipol UGM. Email gunsuryo@yahoo.com.

Telp +628156851144. (2) Dosen Fisipol UGM. (3) Dekan Fakultas Ilmu Budaya, UGM.

Diterima 12 Agustus 2015, direvisi 19 Agustus 2015, disetujui 31 Agustus 2015.

Abstract

This research is done to know migration patterns of Sumenep people, Madura to Saudi Arabia and Malaysia from their subjective meaning, and its impact on local social economy in the place of origin. Methodological paradigm of this research is humanism. Data resources are 788 files of ex-migrant workers (either regular or non-regular) in Sumenep Regency, Madura, East Java Province. Data are gathered through documentary analysis compilation, then being told "lively" through interview with 48 informants chosen from migrant workers, and focus group discussion. Data also enriched through non-participant observation at several migrant workers hubs in Sumenep Regency, and analyzed through qualitative-descriptive technique. The results shows that migrant workers can be divided in three main patterns, namely regular (managed by PPTKIS), non-regular and non-regular absolute (managed by individual mediator, tekong). Their choice based on the reasons that regular pattern through PPTKIS needs much money, have to go through intricate red-tape, and tends formal in its social relation, while non-regular pattern does not need much money, having familiar and emotional social relation, quick process, and arranged by their closed family or friend. Although, according to article 4 juncto article 102 of the Indonesian Human Resources (TKI) Regulation No 39, 2004 stipulating that anyone violates the regulation will be fined 2-15 million rupiah or jailed for 2-10 years. But the regulation still does not discourage Sumenep migrant workers to choose non-regular pattern, as in practice both regular and non-regular remain indifferent. The other result show that the impact of Sumenep migrant workers can activate local social and economy through the remittance they spend in consumtive and business activities, some also donated to infrastructures development, sort of school, lanes, and religious building.

Keywords: *Migration Patterns; Sumenep Migrant Workers; Local Social Economy Impact*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pola migrasi kerja dari pemaknaan subjektif penduduk Sumenep, Madura ke Arab Saudi dan Malaysia. Basis metodologi yang digunakan adalah humanistik yang dimanifestasikan dalam pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data awal adalah berkas dokumen dari 778 eks pekerja migran Sumenep, Madura yang tercatat di Lembaga Solidaritas Buruh Migran Sumenep (SBMS), yang kemudian "dihidupkan" dengan keterangan dari hasil wawancara dengan pekerja migran Sumenep di Arab Saudi, Malaysia dan kantong pekerja migran di Sumenep. Data juga diperkaya dengan FGD dan observasi non-partisipan. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran Sumenep terbagi dalam tiga pola utama, yaitu reguler (dikelola PPTKIS), non-reguler dan non-reguler absolut (dimediasi secara individual oleh *tekong*). Mengacu pada kasus migrasi kerja penduduk Sumenep, dapat disimpulkan bahwa mereka kebanyakan melalui pola non-reguler, karena pola reguler melalui PPTKIS biayanya mahal, prosesnya berbelit-belit, relasi sosialnya sangat formal sehingga tidak cocok dengan budaya penduduk Sumenep lugas dan sederhana. Pola non-reguler biayanya lebih murah, cepat, dan familiar karena kehadiran *tekong* (yang kebanyakan saudara atau teman) yang memiliki relasi sosial lebih akrab dengan calon migran dan majikan, serta lebih melindungi. Meskipun pola non-reguler diancam dengan hukuman kurungan 2-10 tahun atau denda 2-15 miliar rupiah menurut pasal 4 jo 102 Undang-undang No 39 tahun 2004 (tentang penempatan dan perlindungan TKI), tetapi ancaman undang-undang tersebut tetap tidak menghambat laju pekerja migran Sumenep memilih pola non-reguler, karena praktiknya di tempat kerja tidak membedakan antara reguler dan non-reguler. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak kembalinya pekerja migran ke daerah asal, Sumenep dengan uang remiten yang dibelanjakan secara konsumtif dan untuk membuka usaha, dapat menggerakkan sosial ekonomi lokal, bahkan sebagian uang remiten juga didonasikan untuk pembangunan infrastruktur setempat (jalan kampung, sekolah, tempat ibadah) sehingga menggerakkan kegairahan pembangunan setempat.

Kata kunci: *Pola Migrasi Kerja; Pekerja Migran Sumenep; Dampak Sosial-Ekonomi Lokal*

A. Pendahuluan

Kecilnya kehadiran pemerintah Indonesia dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai mendorong tumbuhnya kreativitas sendiri bagi sebagian penduduknya, terutama dalam mencari pekerjaan untuk kelangsungan kehidupannya. Salah satu bentuk kreativitas tersebut adalah pergi bermigrasi kerja ke daerah lain yang dipandang lebih menjanjikan bagi kehidupannya. Salah satu masyarakat yang sudah lama memiliki tradisi bermigrasi kerja tersebut adalah penduduk Sumenep, Madura yang semula bermigrasi karena dorongan sumber daya alam dan sarana mobilitas internal di lingkungan Pulau Madura sendiri yang juga terbatas.

Migrasi kerja awal penduduk Sumenep dimulai ke berbagai daerah di Jawa, kemudian melebar ke luar pulau Jawa, melebar lagi ke Arab Saudi dan Malaysia, sejarah awal migrasi penduduk Sumenep sebenarnya secara individual sudah dimulai seiring dengan kemerdekaan Indonesia. Gejala migrasi kerja kemudian terjadi secara massal sejak tahun 1990, ketika Pulau Kalimantan, yang menjadi daerah tujuan terbanyak dari pekerja migran Sumenep kemudian terjadi konflik sosial (antara pendatang Madura dan penduduk asli Dayak) di Sangau, Kalimantan Barat, diikuti di Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2004. Arus migrasi kerja dari Sumenep menjadi lebih besar lagi ketika harga tembakau di Madura, sebagai komoditas utama (emas hijau) turun ke harga yang paling rendah dalam sejarah perdagangan tembakau, dari kisaran Rp 75.000,- ke Rp 15.000,-.

Dua masalah besar (konflik sosial dan jatuhnya harga tembakau) yang dihadapi penduduk Sumenep tersebut mendorong mereka melakukan migrasi kerja ke Arab Saudi yang membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor domestik, pabrik, dan bangunan, juga ke Malaysia yang membutuhkan tenaga kerja di sektor perkebunan (sawit). Tingginya arus pekerja migran, terutama dari provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur termasuk Sumenep tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan regulasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui keluarnya Undang-Undang No 39 tahun 2004, yang menghendaki setiap pekerja migran harus diurus oleh Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Lembaga swasta yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus perekutan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran. Namun kebijakan regulasi pemerintah tersebut tidak disambut oleh sebagian besar penduduk Sumenep yang bermigrasi kerja, mereka lebih memilih pola non-reguler yang diurus oleh perorangan. Tabel 1 berikut merupakan angka keberangkatan (sorti) penduduk Sumenep ke Arab Saudi dan Malaysia, sebagai negara tujuan utama dalam melakukan bermigrasi kerja.

Mengacu pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara pekerja migran Sumenep yang berangkat ke luar negeri melalui pola reguler dibandingkan dengan pola non-reguler 823:3.744 (1:4,5).² Pola reguler

Tabel 1. Keberangkatan Pekerja Migran Sumenep ke Arab Saudi dan Malaysia

Tahun	Reguler				Non-reguler			
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan	
	AS	M	AS	M	AS	M	AS	M
2008	19	25	35	28	108	173	106	77
2009	23	41	27	21	99	140	183	121
2010	17	24	33	21	77	103	163	98
2011	21	38	24	14	122	179	199	149
2012	25	39	27	15	81	143	154	129
2013	28	49	32	19	98	221	146	68
2014	38	63	49	27	67	141	246	153
Jumlah	172	279	227	145	652	1.100	1.197	795

Sumber: Hasil Kompilasi dari BP3TKI dan Kantor Imigrasi Jawa Timur (2014)¹

adalah migrasi kerja resmi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang N0. 39 tahun 2004, tentang perekutan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), yang istilah umumnya dikenal dengan pekerja migran legal, sedang pola non-reguler yang kemudian dikenal dengan pekerja migran ilegal (mandiri) adalah pekerja migran yang proses perekutannya tidak menurut Undang-Undang No 39 tahun 2004 (melalui jalur PPTKIS) tetapi melalui mediasi individual yang dikenal dengan *tekong*. Dari data yang tersaji dalam Tabel 1 dapat diketahui, bahwa pola migrasi pekerja migran Sumenep merupakan fenomena sosial yang membutuhkan kajian komprehensif secara tersendiri.

Namun kajian komprehensif tentang Madura yang telah banyak dilakukan orang, yang ditulis oleh orang internal Madura sendiri, seperti Wiyata (2002), dalam *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*; Rifa'i (2007), dalam *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Perubahasanya*. Orang dari luar Madura tetapi masih bangsa Indonesia, seperti Kuntowijoyo (1980) dalam *Social Change in Agrarian Society: Madura 1850-1940*; Hastijanti (2005), dalam *Pengaruh Ritual Carok terhadap Pemukiman Tradisional Madura*, dan orang dari kebangsaan luar Indonesia, seperti de Jonge (1989), dalam *Madura: dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam. Suatu Studi Antropologi Ekonomi*; masih memandang bahwa fenomena sosial migrasi kerja menjadi partikel atau bagian kecil pembahasan keseluruhan yang mengungkap tentang adat istiadat, karakter, bahasa, pandangan hidup, kondisi sosial dan budaya penduduk Madura, termasuk Sumenep, sedang kajian tentang migrasi masih belum diungkap menjadi tulang punggung kajian secara tersendiri. Pola migrasi kerja pekerja migran Sumenep tersebut menarik untuk diteliti karena sudah merupakan gejala sosial yang perlu dikaji secara tersendiri, lepas dari aspek kehidupan masyarakat Sumenep yang lain.

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pekerja migran Sumenep memaknai pilihan pola migrasi kerja non-reguler dibandingkan dengan pola reguler? Pertanyaan utama tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan empirik sebagai berikut. (1) Bagaimana respons pekerja migran Sumenep terhadap kehadiran *tekong* sebagai mediator individu (tidak resmi) dan respons pekerja migran Sumenep terhadap kehadiran lembaga pelaksana penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, PPTKIS sebagai mediator resmi yang ditujuk oleh pemerintah, dalam memperoleh pekerjaan di negara Arab Saudi dan Malaysia, dan konsekuensinya bagi hubungan pekerja migran Sumenep dan pemerintah negara asal, tujuan, dan majikan kerja? (2) Bagaimana eksistensi pekerja migran Sumenep, baik yang bermigrasi dengan pola non-reguler dan reguler membangun komunitas sosial-ekonomi baik di negara tujuan maupun daerah asal? (3) Bagaimana perbedaan kajian dan teori terdahulu dan sekarang tentang pekerja migran Madura, khususnya pekerja migran Kabupaten Sumenep?

Jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut ditelusuri secara *emique* (Budi Harsono, 1992: 17) dari pemaknaan subjektif pekerja migran Sumenep, terutama sejak adanya regulasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), melalui penerbitan Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan pemaknaan subjektif pekerja migran Sumenep dalam memilih pola migrasi non-reguler dan reguler, serta konsekuensinya bagi hubungan kelembagaan pekerja migran Sumenep dan pemerintah negara asal, pemerintah negara tujuan, dan majikan pengguna jasa kerja. (2) Mengkaji bagaimana pekerja migran Sumenep, baik yang memilih pola non-reguler maupun reguler, membangun komunitas sosial-ekonomi di negara tujuan dan daerah asal (3) Mengkaji perbedaan antara hasil kajian dan teori terdahulu dengan

hasil penelitian empirik sekarang terhadap pola migrasi kerja pekerja migran Sumenep.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Oleh karena penelitian ini mengkaji tentang pola migrasi kerja dilihat dari pemaknaan subjektif pekerja migran Sumenep, konsekuensi pilihan pada level metodologi adalah humanistik.³ Agar dapat memahami secara komprehensif persepsi subjek yang diteliti, manifestasi metode pendekatan yang dipilih adalah deskriptif-kualitatif, yang diimplementasikan dalam teknik pemilihan sumber data, pengumpulan data, dan analisis sebagai berikut.

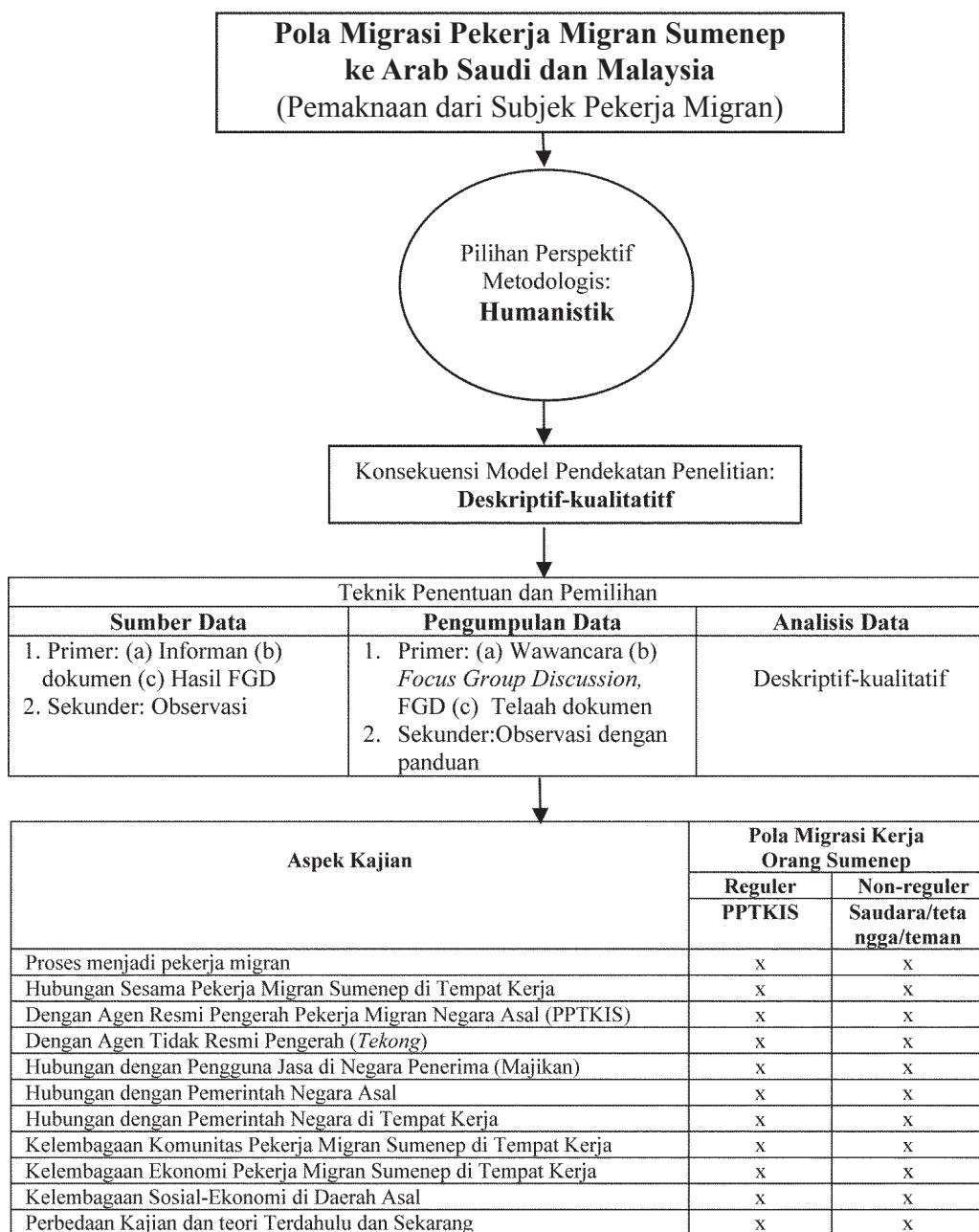
1. Sumber Data: (1) Dokumen, dipilih berdasarkan pertimbangan untuk mengetahui gambaran pola migrasi kerja pekerja migran Sumenep dalam kompilasi data statistik, dari berbagai dokumen dari Kantor Imigrasi Jawa Timur; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Sumenep; BP3TKI Jawa Timur yang cakupan pelayanannya meliputi Madura; dan Solidaritas Buruh Migran Sumenep, SBMS. (2) Informan,⁴ sebagai sumber data yang “menghidupi” hasil kompilasi data statistik. Informan dipilih secara purposif, dengan dasar pertimbangan: Pertama, pekerja migran atau mantan pekerja migran yang dipandang mampu mewakili cerminan pekerja migran Sumenep, khususnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam tentang romatika dan dinamika menjadi pekerja migranti Negara Arab Saudi dan Malaysia. Penentuan jumlah informan yang diwawancara dilakukan secara *snowball*,⁵ dalam arti wawancara dilakukan dengan tidak menentukan terlebih dulu jumlah informan, tetapi menekankan pada keterpenuhan data yang dibutuhkan. Wawancara diakhiri saat informasi yang diperoleh dianggap sudah menuhi tujuan penelitian. Dari teknik pemilihan informan secara *snowball*, diperoleh sebanyak 48 informan, yang kemudian informasinya terangkum dalam deskripsi tentang pola migrasi kerja pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia.

2. Teknik Pengumpulan Data: Pertama, telaah dokumen yang meliputi data tentang keberangkatan pekerja migran Sumenep sejak 2008-2014 ke Arab Saudi dan Malaysia dari Kantor Imigrasi Jawa Timur dan BP3TKI;⁶ Akumulasi pekerja migran Sumenep yang tercatat di komunitas pekerja migranti Arab Saudi dan Malaysia; Peta okupansi pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia. Kedua, wawancara dengan wakil dan mantan pekerja migran Sumenep di Malaysia dan Arab Saudi. Ketiga, *focus group discussion (FGD)* dengan komunitas pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia, serta anggota SBMS di kantong-kantong pekerja migran Kabupaten Sumenep. Keempat, observasi yang dilakukan di kantong-kantong pekerja migran di berbagai kecamatan Sumenep. Keempat teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dalam rangka melakukan triangulasi untuk memperoleh keobjektifan data sejak kompilasi berbagai dokumen, informasi dari 48 informan dan FGD, sampai observasi di kantong-kantong pekerja migran Kabupaten Sumenep.

3. Teknik Analisis Data: menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, terutama pada aspek: Pertama, dasar pertimbangan subjektif pekerja migran Sumenep memilih pola reguler dan non-reguler, serta konsekuensi proses dari masing-masing pola pilihan migrasi tersebut. Kedua, jalinan sosial-budaya sesama pekerja migran Sumenep dalam berinteraksi dengan sesama warga daerah asal. Ketiga, hubungan kerja dengan majikan pengguna jasa (*employer*). Keempat, hubungan dengan pemerintah di negara asal dan negara tempat kerja dalam mempertahankan eksistensi pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia. Kelima, dampak sosial dan ekonomi eksistensi pekerja migran Sumenep di daerah asal.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran terbanyak dari Indonesia dengan tujuan utama Arab Saudi dan Malaysia.

Bagan 1. Alur Pemilihan Metodologis, Konsekuensi Metode dan Implementasi Teknik Penelitian



Ruang berlabel "x" dalam bagan kerangka kajian di atas merupakan ruang aspek kajian pola migrasi pekerja migran Sumenep, baik melalui proses *reguler* (PPTKIS) maupun *non-reguler* (melalui *tekong*). Fokus kajian juga meliputi kelembagaan hubungan sosial antara pekerja migran Sumenep dengan sesama pekerja migran di tempat kerja, agen pengerah pekerja migran

negara asal, agen pengerah di negara penerima, majikan pengguna jasa (*employer*) di negara penerima, pemerintah negara asal, pemerintah negara di tempat kerja, dampak eksistensi pekerja migran Sumenep terhadap tumbuhnya lembaga sosial dan ekonomi di daerah asal (*sending area*), dan perbedaan antara hasil kajian terdahulu dan sekarang tentang pekerja migran.

C. Pola Migrasi Pekerja Migran Sumenep ke Arab Saudi dan Malaysia

1. Tahapan Akumulasi Pekerja Migran Sumenep

Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan regulasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan diterbitkannya Undang-undang No 39 tahun 2004, kebijakan tersebut membawa implikasi pada adanya dua status utama pekerja migran, legal (reguler) yang mengikuti regulasi pemerintah dan tidak legal (non-reguler) yang tidak mengikuti regulasi pemerintah. Dari hasil FGD-1 yang dilakukan dengan mantan pekerja migran di Desa Sekarguluk, Sumenep diperoleh keterangan, ternyata terhimpunnya pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia memiliki sejarah kronologi tahapan yang berbeda. Tabel 2 berikut merupakan hasil penelusuran dari beberapa informan mantan pekerja migran Sumenep tentang tahapan akumulasi kedatangan mereka di Arab Saudi.

Perbedaan status legal (reguler) dan tidak legal (non-reguler) tersebut sebenarnya menurut Koser (2007: 54-56) tidak disetujui, karena apapun statusnya seseorang yang bekerja, kapan pun dan di mana pun, merupakan hak mereka untuk melangsungkan kehidupan. Menurut Koser, perbedaan sebenarnya hanya pada masalah kelengkapan administrasi, tetapi konsekuensi dari masing-masing entitas pekerja migran reguler dan non-reguler tidak perlu membawa konseku-

ensi perbedaan penyikapan bagi mereka. Namun dalam realitasnya penyikapan terhadap dua pola migrasi kerja, baik dari pemerintah negara pengirim (*sending country*) maupun negara penerima (*accepting country*) selalu berbeda. Akan tetapi dari hasil keterangan beberapa informan mantan pekerja migran, penyikapan dari pihak pengguna jasa kerja (majikan) di Arab Saudi terhadap pekerja migran reguler dan non-reguler justru tidak berbeda, sepanjang pekerja migran bersangkutan mampu melakukan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Tabel 3 berikut merupakan gambaran tahapan kedatangan pekerja migran di Malaysia.

Dalam pola migrasi kerja pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia, sebutan ilegal adalah mereka yang bekerja dengan hanya berbekal administrasi paspor dan visa kunjungan, tidak memiliki izin kerja resmi di negara lain, sedang mereka yang kemudian disebut reguler adalah mereka yang mengikuti regulasi sejak diterbitkannya Undang-undang No 39 tahun 2004. Mereka yang disebut non-reguler adalah yang bekerja mandiri, tidak memiliki syarat administrasi formal sebagai pekerja migran, dan mereka yang tidak direkrut oleh pemerintah atau lembaga yang didelegasikan pemerintah (PPT-KIS) untuk merekrut pekerja migran. Pekerja migran Sumenep ilegal adalah sama dengan pekerja migran non-reguler ketika Undang-undang No 39 tahun 2004 (yang mengatur tentang regulasi

Tabel 2. Tahapan Terhimpunnya Pekerja Migran Sumenep di Arab Saudi

Masa	Tujuan Awal	Bertahan Sebagai	Status Kemudian
Pra 1970	Naik Haji	Lepas dari maghtab, bertahan di Arab Saudi	Bekerja secara ilegal dan menjadi mukimin
Pasca 1970	Naik haji atau berumrah	Lepas dari maghtab, tidak pulang, lalu direkrut mukimin dari Sumenep untuk bekerja kerja mandiri secara ilegal..	a. Menjadi <i>overstayer</i> , bekerja secara ilegal
Pasca 2004	a. Ikut regulasi pemerintah dengan Undang-undang No 39 tahun 2004 b. Bekerja mandiri non-reguler	a. Pekerja migran legal kontrak dua tahunan b. <i>Overstayer</i> , karena masa kontrak habis c. Pekerja migran mandiri non-reguler	a. Pekerja migran reguler b. Pekerja migran mandiri non-reguler

Sumber: Hasil FGD-1 (2014)

Tabel 3. Tahapan Terhimpunnya Pekerja Migran Sumenep di Malaysia

Masa	Tujuan Awal	Bertahan Sebagai	Status Kemudian
Pra 1980	Mencari alternatif tujuan migrasi dan pekerjaan baru sehubungan dengan permintaan tenaga kerja yang tinggi di perkebunan sawit	Pekerja migran mandiribermodal paspor dan visa kunjungan	1. Pekerja migran ilegal mandiri 2. Mukimin
Pasca 1980	a. Pengembangan migrasi kerja tidak hanya dalam lingkup regional b. Pengembangan komunitas	a. Pekerja migran mandiri b. Pekerja berkelompok	a. Wisatawan yang bekerja ilegal b. Mukimin
Pasca 1992	Lepas dari konflik sosial antara suku Madura dan Dayak di Sangau, Kalimantan Barat.	Menyeberang ke Malaysia Timur (Sabah) sebagai pekerja mandiri dan kelompok <i>non-reguler</i>	a. Mukimin b. Wisatawan yang bekerja secara mandiri ilegal
Pasca 2004	a. Lepas dari konflik sosial 2005 di Kalimantan Tengah. b. Ikut regulasi pemerintah dengan Undang-undang No 39 tahun 2004	a. Pekerja mandiri non-reguler b. Pekerja migran reguler	a. Pekerja migran non-reguler b. Pekerja migran non-reguler absolut c. Pekerja migran reguler d. Mukimin

Sumber: Hasil FGD-2 (2014)

penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia) diberlakukan.

Meskipun terhimpunnya pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia melalui tahapan yang berbeda, tetapi di negara tempat kerja hubungan antara anggota komunitas pekerja migran Sumenep pola reguler dan non-reguler, tidak berbeda dan merasa satu solidaritas. Mereka merasa sama satu pekerja migran dan daerah asal, Sumenep, Madura sehingga apabila ada kesempatan untuk saling bertemu ketika libur kerja, tidak peduli status mereka sebagai reguler atau non-reguler, mereka saling bertukar pengalaman, saling menolong ketika salah satu menghadapi masalah hubungan kerja, saling melindungi dan mencari pekerjaan baru. Solidaritas tersebut menurut Weber (1968: 213) karena dipersatukan kesamaan kepentingan, sama-sama bekerja di negara lain untuk mencari uang, tetapi dalam kasus komunitas pekerja migran Sumenep, mereka juga dipersatukan oleh kesamaan daerah asal (*primordialism*), yang dalam teori pembagian kerja Durkheim (1964: 79) disebut *mechanical solidarity*. Namun karena di Arab Saudi pekerja migran tidak dibolehkan membentuk organisasi secara terbuka, hubungan antarpekerja migran Sumenep dilakukan secara diam-diam dan tertutup, *closed relationship*,

tidak mencolok di muka umum tetapi tetap ada komunikasi antaranggota komunitas. Namun dalam teori Weber (1968: 139), jalinan tertutup adalah yang tidak menerima anggota dari komunitas luar, sedang dalam kasus komunitas pekerja migran Sumenep di Arab Saudi jalinan tertutup karena keberadaan komunitas terbuka bagi pekerja migran dilarang oleh pemerintah negara tempat kerja.

Kondisi yang berbeda dialami pekerja migran Sumenep di Malaysia, karena berkumpul secara terbuka tidak dilarang, mereka dapat membentuk komunitas terbuka, bahkan sampai dapat melakukan dan mendapatkan berbagai hal (makan, minum, merokok, mendatangkan kiai untuk santapan rokhani) dari Sumenep, sehingga keterbukaan di antara anggota komunitas pekerja migran Sumenep di Malaysia, dapat mendekatkan kondisi kehidupan komunitas pekerja migran Sumenep di tempat kerja seolah-olah seperti di daerah asal, bahkan modal sosial⁷ yang tinggi di daerah asal dapat dibawa ke Malaysia dalam memperkuat komunitas pekerja migran Sumenep.

Apabila dianalisis secara sosiologis, ada aksioma yang berbeda dengan teori *rational choice* dalam migrasi (Ritchey, 1976: 389 dan Uhlenberg, 1973: 309), bahwa modal sosial yang kuat

di daerah asal akan menghambat (*hampered*) dorongan suatu masyarakat untuk bermigrasi, dalam kasus migrasi kerja penduduk Sumenep justru terbalik. Modal sosial yang tinggi di kalangan masyarakat Sumenep justru dibawa pergi bermigrasi kerja untuk memperkuat komunitas di negara tempat kerja, karena modal sosial yang tinggi dalam masyarakat Sumenep justru merestui, *blessed* (Ismani, 1978 dan Abdurrahman, 1980) anggotanya untuk bekerja keluar Madura, bahkan dalam bermigrasi (termasuk hasilnya) dapat dijadikan citra tersendiri bagi penduduk Sumenep dibandingkan hanya tinggal dan bekerja di rumah, karena kehidupan pekerja migran Sumenep selalu diasosiasikan dengan kehidupannya yang meningkat lebih baik. Dalam konteks pola migrasi kerja masyarakat Sumenep, aksioma Coleman bahwa modal sosial yang tinggi akan menghambat migrasi justru sebaliknya, modal sosial mendorong laju migrasi kerja masyarakat Sumenep.

Terakumulasinya pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia juga didasari oleh kondisi sosial-budaya orang Sumenep yang suka berbagi keberhasilan di luar Madura dengan mengajak saudara, tetangga, teman yang masih tinggal di tempat asal untuk ikut bekerja seperti orang-orang yang berhasil di luar Madura, ternyata juga termanifestasi di kalangan pekerja migran Sumenep dengan mengajak penduduk yang masih tinggal di kampung untuk ikut bermigrasi kerja. *Tekong-tekong* asal Sumenep ternyata merupakan katalisator gerakan bermigrasi kerja masyarakat Sumenep ke luar Madura, khususnya ke Arab Saudi dan Malaysia. Mengajak saudara, tetangga, dan teman bermigrasi kerja di kalangan pekerja migran Sumenep ke luar negeri bukan merupakan ancaman persaingan antarmereka, melainkan justru dianggap sebagai penguatan eksistensi komunitas pekerja migran Sumenep di luar negeri.

Apabila dianalogikan dengan hasil penelitian Geertz di Mojokuto (1977: 34-36), Jawa Timur juga ada kesamaan di mana berkumpulnya pedagang yang menjual barang-barang sama di suatu pasar tradisional tidak dianggap sebagai

sebuah persaingan, tetapi justru untuk menunjukkan eksistensi mereka yang lebih tampak keluar (*show off*) di hadapan pembeli. Hasil penelitian terdahulu (Ismani, 1978: 169) yang menemukan pekerja migran Madura tersterio tipe dalam profesi-profesi tertentu yang sudah terbentuk oleh generasi pendahulunya, dalam kasus pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia juga sudah berubah, mereka tidak terpaku ke dalam profesi tertentu tetapi terserap ke dalam berbagai profesi yang ditawarkan oleh majikan dan sanggup dikerjakan oleh pekerja migran Sumenep.

2. Pilihan Pola Migrasi Pekerja Migran Sumenep

a. Pilihan Pola Reguler

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, pilihan migrasi kerja pola reguler ternyata dilakukan oleh pekerja migran Sumenep dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi cukup. Menurut Undang-undang No 39 tahun 2004, syarat menjadi pekerja migran di luar negeri minimal harus berpendidikan SMP dan biaya administrasi antara Rp 6.000.000,- sampai dengan Rp 12.000.000,- tergantung jauh dekatnya tempat tinggal (kota, pelosok desa, kepulauan) pekerja migran dengan kantor yang mengurus proses administrasi pekerja migran, semakin jauh dengan kantor PPTKIS semakin tinggi biaya administrasinya.

Dari penelusuran melalui wawancara dengan beberapa informan yang terakumulasi dalam FGD-2 diperoleh informasi, bahwa migrasi kerja pola reguler hanya direspon oleh pekerja migran Sumenep yang tinggal di wilayah sekitar kota (kecamatan di sekitar keraton Sumenep) yang rata-rata memiliki kemampuan ekonomi dan bekal pendidikan cukup untuk menjadi pekerja migran reguler dan memiliki pola kehidupan yang mudah diatur dalam struktur organisasi (regulasi migrasi kerja dari PPTKIS) sebagai pengaruh dari budaya Keraton Sumenep.

Untuk pekerja migran yang jauh dari keraton sentris (pelosok desa dan kepulauan) yang jauh dari pengaruh kehidupan keraton, pola reguler

hanya direspon ketika pekerja migran Sumenep baru pertama kali bekerja ke luar negeri (Arab Saudi dan Malaysia), untuk mencoba-coba mendapatkan pengalaman. Apabila kemudian kembali bekerja ke luar negeri, pola migrasi kerja yang mereka pilih adalah pola non-reguler, karena mereka sudah memiliki jalinan relasi dengan majikan pembutuh tenaga kerja di Arab Saudi dan Malaysia. Dari informan yang berbeda diperoleh informasi, bahwa pola migrasi kerja reguler dilakukan karena ada kecenderungan varian sikap pekerja migran Sumenep yang lebih memilih pekerjaan formal (*skilled*)⁸ dibandingkan pekerjaan di sektor privat, yang tidak memerlukan keterampilan khusus dan biasa disediakan untuk pekerja migran non-reguler. Tabel 4 berikut merupakan peta okupansi pekerja migran

Sumenep reguler di Arab Saudi dan Malaysia, sejak tahun 2008 sampai tahun 2014.

Menurut Gumarang (2004: 56), khusus pilihan migrasi kerja reguler tersebut memang disebabkan pengaruh varian sikap penduduk Sumenep, dibandingkan dua kabupaten lainnya di Madura barat (Sampang dan Bangkalan), yang lebih memilih pekerjaan struktural-formal dibandingkan pekerjaan informal. Struktural-formal merupakan bidang pekerjaan yang memiliki administrasi pengelolaan kelembagaan, sedang informal merupakan bidang pekerjaan yang sangat individual, seperti pedagang kecil dan pekerjaan di sektor domestik. sehingga tidak membutuhkan administrasi pengelolaan kelembagaan,

Tabel 4. Peta Okupansi Pekerja Migran Reguler Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia

Tahun	Okupansi Kerja di Arab Saudi	Lk	Pr	Okupansi Kerja di Malaysia	Lk	Pr	Total	
							Lk	Pr
2008	1. Perusahaan Kain	4	15	1. PRT	5	12	9	26
	2. PRT	5	17	2. Pabrik Konveksi	2	7	7	23
	3. Pelayan Toko	2	2	3. Pelayan Toko	1	8	3	9
	4. Pabrik Sabun	2	4	4. Karyawan Hotel	-	5	2	8
	5. Pelayan Rumah Sakit	1	4	5. Pabrik Onderdil Motor	4	-	5	3
	6. Pertambangan	9	-	6. Pabrik Kembanggula	3	5	7	5
2009	1. Perusahaan Konveksi	3	11	1. Perusahaan Konveksi	3	10	6	21
	2. PRT	5	10	2. PRT	-	14	5	24
	3. Pelayan Toko	1	5	3. Pelayan Toko	1	6	2	11
	4. Rumah Sakit	2	7	4. Karyawan Hotel	4	6	6	13
	5. Pabrik Kerudung Haji	3	8	5. Pabrik Elektronik	4	-	7	8
	6. Pertambangan	2	-	6. Pabrik Alat Listrik	6	-	8	-
2010	1. Pabrik Batako	7	-	1. Perusahaan Kosmetik	2	9	9	9
	2. PRT	4	9	2. PRT	-	8	4	17
	3. Perusahaan Sepatu	5	2	3. Pelayan Toko	1	5	6	7
	4. Rumah Sakit	1	10	4. Karyawan Hotel	3	2	4	12
	5. Pabrik Kertas	2	2	5. Pabrik Elektronik	5	-	7	9
	6. Pertambangan	3	-	6. Pabrik Alat Listrik	8	-	11	-
2011	1. Pabrik Souvenir	4	9	1. Perusahaan Konveksi	1	7	5	16
	2. PRT	5	24	2. PRT	-	9	5	33
	3. Perusahaan Sepatu	6	-	3. Pelayan Toko	3	3	9	3
	4. Rumah Sakit	-	8	4. Karyawan Hotel	2	3	5	11
	5. Pabrik Roti	1	-	5. Pabrik Elektronik	2	-	3	-
	6. Pertambangan	3	-	6. Pabrik Alat Listrik	4	-	7	-
2012	1. Sopir Umum	9	11	1. Perusahaan Konveksi	6	12	15	23
	2. Makanan Kemasan	5	9	2. Pabrik kosmetik	-	10	5	19
	3. Perusahaan Sepatu	7	-	3. Pelayan Toko	2	5	9	5
	4. Rumah Sakit	2	11	4. Karyawan Hotel	4	2	6	13
	5. Pabrik Roti	1	-	5. Pabrik Elektronik	3	-	4	-
	6. Pertambangan	3	-	6. Pabrik Alat Listrik	4	-	7	-
2013	1. Pabrik Souvenir	6	12	1. Perusahaan Konveksi	5	9	11	21
	2. Sopir Umum	13	17	2. Pabrik kosmetik	-	9	13	26
	3. Perusahaan Sepatu	6	-	3. Pelayan Toko	2	8	8	8
	4. Rumah Sakit	2	13	4. Karyawan Hotel	1	4	3	17
	5. Pabrik Roti	3	-	5. Pabrik Elektronik	6	-	9	-
	6. Pertambangan	8	-	6. Pabrik Alat Listrik	5	-	13	-
2014	1. Pelayan Rumah makan	7	11	1.Konstruksi Baja	6	-	13	11
	2. Perusahaan Tenun	7	9	2. Bengkel	5	-	12	9
	3. Karyawan Hotel	11	14	3. Perawat Rumah Sakit	-	13	11	27
	4. Satuan Pengaman	9	-	4. Pabrik Alat Kecantikan	-	11	9	9
	5. Juru Parkir	4	-	5. Perkebunan Buah	4	4	8	8
	6. Operator Leveransir Barang	6	-	6. Pabrik Alat Rumah Tangga	3	2	9	9
	Jumlah	192	254	Jumlah	115	210	307	473

Sumber: Hasil Kompilasi Data SBMS (2014)

Dari peta okupansi pekerja migran reguler dari Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia, tampak bahwa pekerja migran Sumenep tidak lagi tersterio tipe lagi dalam pekerjaan tertentu seperti yang dilakukan oleh generasi pendahulunya, tetapi bekerja dalam berbagai profesi yang tersedia dan mampu dilakukannya. Menurut keterangan beberapa informan mantan pekerja migran, penyerapan pekerja migran Sumenep ke berbagai sektor pekerjaan karena adanya penawaran kerja dari majikan dan intervensi dari PPTKIS yang mengarahkan ke bidang pekerjaan tertentu, ketika dipandang cocok dengan ketererampilannya, pekerjaan tersebut kemudian dilakukan. Pekerja migran pola reguler Sumenep tersalur dalam bidang pekerjaan formal yang dikelola dalam kelembagaan dan memiliki skema kerja dan pengupahan yang baku dan jelas. Peta okupansi pekerja migran Sumenep seperti dalam Tabel 3 di atas membuktikan, bahwa hasil penelitian Ismani (1978: 169) tentang sterio tipe profesi pekerja migran Sumenep perlu dikaji ulang, karena sudah tidak lagi dalam profesi terbatas dan regional tetapi mengerjakan berbagai profesi dan berlingkup internasional.

b. Pilihan Pola Non-reguler

Dari hasil penelusuran terhadap beberapa informan, yang terakumulasi dalam hasil FGD-4 diperoleh informasi, bahwa pola migrasi kerja non-reguler dipilih pekerja migran Sumenep yang memiliki bekal pendidikan kurang (SMP minus)⁹ dan kemampuan ekonomi yang tidak mencukupi guna memenuhi syarat administrasi dan biaya pola reguler.¹⁰ Pekerja migran Sumenep yang memilih pola non-reguler bermigrasi kerja tidak melalui agen resmi (PPTKIS) yang mendapat mandat resmi dari pemerintah, tetapi diurus melalui mediasi individual, populer disebut *tekong* yang ternyata biasanya masih saudara, tetangga, atau teman. Pekerja migran Sumenep merespons pola non-reguler karena sangat familiar, prosesnya mudah dan cepat, hanya membutuhkan biaya pembuatan paspor dan visa ke negara tujuan (Arab Saudi atau Malaysia), yang rata-rata biayanya di bawah

Rp 5.000.000,-, bahkan apabila tidak ada uang sama sekali biaya dapat dipinjami lebih dulu oleh *tekong*, dengan kompensasi setelah bekerja selama tiga sampai enam bulan (tergantung hitungan banyak sedikitnya pinjaman), upah kerja diberikan lebih dahulu kepada *tekong* sebagai pelunasan hutang, baru upah kerja selanjutnya dapat dimiliki pekerja migran sendiri setelah hutangnya lunas.

Di samping faktor ekonomi dan pendidikan yang tidak mencukupi bagi pekerja migran Sumenep, terutama yang berasal dari wilayah pelosok desa dan kepulauan, juga ada faktor lain yang menurut Wiyata (2003: 56) memang dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya di kalangan masyarakat Madura pada umumnya dan Sumenep pada khususnya, bahwa orang Madura lebih suka berinteraksi dan berurus dengan sesama Madura (*taretan semma*) dibandingkan dengan orang dari daerah lain. Dalam menjadi pekerja migran pun, penduduk Sumenep lebih suka bermediasi dengan *tekong* sesama penduduk Sumenep, yang memiliki jalinan premordial, meskipun statusnya kemudian menjadi pekerja migran non-reguler (tidak resmi atau ilegal), yang penting dapat bermigrasi kerja dan bisa bergabung dengan sesama penduduk Sumenep yang lebih dahulu menjadi pekerja migran.

Dari hasil FGD dengan mantan pekerja migran di kantong-kantong pekerja migran Sumenep juga diperoleh pemaknaan, bahwa pekerja migran Sumenep lebih memilih mediator dengan *tekong* karena di samping mereka adalah saudara, tetangga, atau teman sendiri, *tekong* juga dapat memberi gambaran jelas tentang siapa calon majikan, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, suasana kerja yang akan dihadapi, dan mempertemukan dengan sesama pekerja migran Sumenep yang lebih dahulu bermigrasi kerja ke Arab Saudi dan Malaysia.

Gambaran jelas tentang majikan, suasana kerja, dan jenis pekerjaan tersebut tidak pernah bisa digambarkan ketika pekerja migran Sumenep memilih pola reguler melalui PPTKIS, karena walaupun ada jaminan formal penempatan dan perlindungan kerja di tempat tujuan,

dilengkapi dengan latihan kerja dan kontrak kerja, tetapi prakteknya mereka tidak memperoleh gambaran jelas tentang majikan, suasana dan jenis pekerjaan, kadang-kadang latihan keterampilan hanya merupakan “stempel formal” yang prakteknya tidak pernah diberikan. Menurut beberapa informan mantan pekerja migran Sumenep, PPTKIS lebih mementingkan pada banyaknya pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi dan Malaysia, keharusan dalam bentuk pembekalan keterampilan kerja dan pendampingan sampai ke negara tujuan, terkadang tidak diberikan sehingga menyebabkan pekerja migran pola reguler sulit beradaptasi dengan suasana kerja di negara penerima. Apabila dianalisis dengan AGIL (Parson, 1960: 58), respons negatif di kalangan pekerja migran Sumenep terhadap PPTKIS karena sebagai lembaga yang diberi kepercayaan pemerintah untuk mengelola regulasi TKI tidak menjalankan keharusan fungsional (*functional imperative*) dalam berorganisasi, yang meliputi melakukan adaptasi, menyusun tujuan yang jelas, melakukan integrasi dengan masyarakat yang dilayani, dan meningkatkan kebutuhan laten tentang segala hal yang diinginkan pekerja migran Sumenep, sehingga keberadaannya tidak mendapat respons positif kalangan pekerja migran Sumenep.

Pilihan pola non-reguler membawa konsekuensi pekerja migran Sumenep pergi ke negara tujuan kerja dengan lebih dulu menyamar menjadi “wisatawan”, kemudian secara diam-diam bekerja di tempat majikan pembutuh kerja melalui relasi yang dimediasi oleh *tekong*, atau mandiri bagi yang sudah terbiasa bermigrasi kerja, meskipun pilihan tersebut sebenarnya bertentangan dengan Undang-undang No 39 tahun 2004 (penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia). Namun pelanggaran tersebut tetap bisa dilakukan oleh pekerja migran Sumenep karena mereka telah diurus oleh sindikasi informal antara *tekong* sebagai mediator, majikan sebagai pembutuh jasa kerja, dan pekerja migran sendiri sebagai penyedia jasa kerja. Sindikasi kelembagaan informal antara pekerja migran, *tekong*, majikan tersebut sudah berlangsung

lama sejak sebelum Undang-undang No 39 tahun 2004 dikeluarkan, sehingga respons pekerja migran Sumenep kebanyakan terhadap regulasi pemerintah juga negatif.

Dari hasil penelusuran melalui FGD-5 di negara tujuan kerja (Arab Saudi) dan FGD-6 (di Malaysia) dan observasi dalam komunitas pekerja migran Sumenep, pola non-reguler ternyata realitasnya membawa keuntungan fungsional antara majikan-*tekong*-pekerja migran. Majikan memperoleh tenaga kerja tanpa harus membayar uang komisi jasa mendatangkan pekerja migran karena langsung berhubungan secara informal dengan *tekong* sebagai pemasok tenaga kerja, *tekong* memperoleh “fee” dari memasok tenaga kerja, pekerja migran dapat mengurus proses kerja dengan lebih praktis, murah, mudah, dan dilindungi oleh saudara, tetangga, atau teman sesama komunitas daerah asal yang sudah menjadi mukimin di negara tempat kerja.

Menurut keterangan dari beberapa informan, dalam perkembangannya kemudian, pola non-reguler juga dapat terjadi apabila pekerja migran Sumenep yang semula bekerja melalui pola reguler, kemudian nekat lari dari majikan dan bertahan di Arab Saudi atau Malaysia mencari pekerjaan secara mandiri, atau mereka yang sebenarnya sudah habis masa kontrak kerjanya (*overstayed*) tetapi nekat tidak mau pulang dan bertahan dengan mencari pekerjaan sendiri. Jalinan persaudaraan, ketetanggaan, dan pertemanan dengan sesama pekerja migran Sumenep dan petugas imigrasi selama bekerja di Arab Saudi dan Malaysia yang sudah terjalin baik, memungkinkan pekerja migran Sumenep untuk bertahan (*survived*) meskipun syarat-syarat administrasi mereka sudah tidak berlaku lagi.

Apabila pekerja migran yang *overstayed* tersebut ingin pulang ke Indonesia, mereka tinggal melapor ke KBRI, berpura-pura sebagai pekerja migran yang bermasalah untuk kemudian dibuatkan surat laksana paspor (SLP) sebagai bekal pulang ke Indonesia. Di Arab Saudi, di bawah jembatan layang Al Hambra, pekerja migran Sumenep dapat bergabung dengan komunitas migran dari berbagai daerah di Indonesia,

bahkan dari negara lain sesama asal pekerja migran untuk “menangkapkan diri” agar dideportasi ke Indonesia dengan biaya pemerintah Arab Saudi atau Indonesia. Peta okupansi pekerja migran non-reguler Sumenep terserap dalam bidang pekerjaan privat (domestik) yang sistem pekerjaannya dikelola secara perorangan sehingga hubungan kerjanya bersifat majikan-pekerja, tidak lembaga-pekerja seperti dalam bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja migran Sumenep pola reguler. Namun apapun bidang pekerjaannya dan pola migrasi kerjanya, ketika mereka saling bertemu dalam kesempatan libur kerja, hanya ada satu identitas, yaitu pekerja migran asal Sumenep.

Peta okupansi pekerja migran non-reguler Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia juga menunjukkan adanya perkembangan variasi pekerjaan yang sudah berbeda jauh meninggalkan profesi yang semula dikerjakan ketika pekerja migran Sumenep masih dalam lingkup regional, Indonesia. Dari hasil beberapa wawancara di salah satu kantong pekerja migran Sumenep, Kecamatan Pasongsongan, juga diperoleh pemaknaan bahwa pola non-reguler dipilih pe-

kerja migran Sumenep agar tidak terkekang sistem kontrak kerja dua tahunan sebagaimana melalui pola reguler, sehingga setiap waktu apabila diijinkan majikan, bisa memohon cuti kerja untuk menengok daerah asal. Suatu tradisi pulang yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sumenep terutama pada Idul Fitri dan Idul Adha (masa kepulangan haji, *toron haji*, saudara atau tetangga dari Mekkah, Arab Saudi), yang dalam migrasi kerja pola reguler tidak bisa dilakukan karena menjalani kontrak kerja.

Motivasi kebanyakan pekerja migran Sumenep tidak menaati regulasi dari pemerintah tersebut tidak dapat dikategorikan pembangkangan, apabila dibandingkan *civil disobedience*-nya *Thoreau* (dalam Brownlee, 2006: 179) tetapi dilatarbelakangi oleh kondisi pekerja migran Sumenep yang telah lebih dahulu biasa berurus dengan *tekong* dalam bermigrasi kerja ke Arab Saudi dan Malaysia sebelum Undang-undang No 39 tahun 2004 dikeluarkan, sehingga kehadiran pemerintah melalui regulasi tenaga kerja Indonesia direspon sebagai kebijakan yang mengganggu kenyamanan dan kemapanan, ikut campur terhadap pekerja migran Sumenep

Tabel 5. Peta Okupansi Pekerja Migran Non-reguler Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia

Tahun	Okupansi Kerja di Arab Saudi	Lk	Pr	Okupansi Kerja di Malaysia	Lk	Pr	Total	
							Lk	Pr
2008	1. Rumah Tangga	26	107	1. Rumah Tangga	11	142	37	249
	2. Peternakan	23	-	2. Perkebunan	54	19	77	19
	3. Pekerja Sosial Keluarga	7	15	3. Rumah Makan	7	20	14	35
	4. Sopir pribadi	33	-	-	-	-	33	-
2009	1. Rumah Tangga	28	99	1. Rumah Tangga	19	156	4	302
	2. Peternakan	12	-	2. Perkebunan	95	32	107	32
	3. Pekerja Sosial Keluarga	9	34	3. Rumah Makan	9	20	18	54
	4. Sopir Pribadi	30	-	-	-	-	30	-
2010	1. Rumah Tangga	21	73	1. Rumah Tangga	26	121	142	194
	2. Peternakan	18	-	2. Perkebunan	61	24	79	24
	3. Pekerja Sosial Keluarga	6	34	3. Rumah Makan	8	11	14	45
	4. Sopir Pribadi	38	-	-	-	-	38	-
2011	1. Rumah Tangga	36	139	1. Rumah Tangga	19	126	55	265
	2. Peternakan	26	-	2. Perkebunan	88	53	114	53
	3. Pekerja Sosial Keluarga	11	34	3. Rumah Makan	9	32	20	66
	4. Sopir Pribadi	55	-	4. Konstruksi Bangunan	21	-	76	-
2012	1. Rumah Tangga	19	78	1. Rumah Tangga	19	79	38	157
	2. Peternakan	25	-	2. Perkebunan	72	23	97	23
	3. Pekerja Sosial Keluarga	7	53	3. Konstruksi Bangunan	34	-	41	53
	4. Sopir Pribadi	36	-	4. Industri Rumah Tangga	6	56	42	56
2013	1. Rumah Tangga	31	89	1. Rumah Tangga	13	94	44	133
	2. Peternakan	24	-	2. Perkebunan	71	31	95	31
	3. Pekerja Sosial Keluarga	9	47	3. Konstruksi Bangunan	29	-	38	47
	4. Sopir Pribadi	35	-	4. Industri Rumah Tangga	9	51	44	51
2014	1. Pengawal Anak Sekolah	7	22	1. Perkebunan	43	22	50	44
	2. Pembantu Rumah Tangga	5	31	2. Pekerja rumah Makan	9	19	14	50
	3. Konstruksi Jalan	3	-	3. Pengalengan Ikan	13	7	16	7
	4. Penjaga Kios elektronik	2	11	4. Sopir Pribadi	22	-	24	35
	Jumlah	582	866	Jumlah	767	1.138	1.349	2.028

Sumber: Hasil Kompilasi Data SBMS (2014)

dalam proses memperoleh pekerjaan. Apabila dianalogikan dengan Scott (2009: 178) dalam *the Art of not being Governed*, menjadi pekerja migran melalui mediasi *tekong* meskipun ilegal sudah menjadi “seni” tersendiri bagi masyarakat Sumenep dalam bermigrasi kerja, karena murah, praktis, mudah, tidak banyak persyaratan, bebas karena tidak ada campur tangan peraturan dan lembaga lain (pemerintah), dan tetap dekat dengan komunitas Sumenep di luar negeri, sehingga mereka tidak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kehidupan kerja baru, karena dibimbing sesama orang Sumenep pendahulu (*pioneer migrants*). Orang-orang yang berfungsi sebagai pembimbing dalam beradaptasi dengan kehidupan baru di tempat kerja tersebut tidak ditemukan apabila pekerja migran Sumenep mengikuti regulasi pemerintah (PPTKIS).

Pola migrasi kerja pekerja migran Sumenep berbeda dengan pekerja migran di daerah lain di Indonesia, kalau pekerja migran di daerah lain “tercerabut” komunikasi dengan keluarga di daerah asal selama menjalani pekerjaan di negara lain, pekerja migran Sumenep secara intens tetap berkomunikasi secara fisik dengan keluarga di daerah asal, paling tidak melalui tradisi pulang pada saat Idul fitri dan Idul Adha (*toron haji*), dan apabila dimungkinkan melalui hubungan telpon seluler. Komunikasi yang tetap dijalin secara intens tersebut sebenarnya “menyanggah” pandangan umum yang menjuluki penduduk Madura, termasuk Sumenep, sebagai masyarakat perantau seperti halnya masyarakat Minang dan Bugis, karena sebenarnya pekerja migran Sumenep bukan perantau melainkan pekerja yang “melanglang buana” dan selalu kembali secara fisik ke daerah asal melalui momen-momen Idul Fitri, Idul Adha, dan hajatan keluarga (Wiyata, 2015).

Hubungan intens pekerja migran Sumenep dengan keluarga di daerah asal tersebut yang juga menyanggah teori Juliette Koning (2004: 354), yang berpendapat bahwa dalam masyarakat migran, peran anggota keluarga dalam struktur keluarga akan berubah seiring dengan absennya salah satu anggota keluarga (ayah, ibu, anak)

selama menjadi pekerja migran. Akan tetapi di kalangan keluarga pekerja migran Sumenep berbeda, struktur dalam keluarga selama ditinggal bermigrasi tidak berubah, karena tetap ada hubungan intens antaranggota keluarga di tempat kerja dan daerah asal, yang sekaligus juga dapat dijadikan alat pengontrol dan penjaga keutuhan struktur keluarga seperti saat-saat sebelum ditinggal bermigrasi.

a. Pilihan Pola Non-reguler Absolut

Di antara dua pola migrasi kerja utama, reguler dan non-reguler, ada pola non-reguler absolut, termanifestasi dalam status pekerja migran yang bekerja di Malaysia (tidak di Arab Saudi). Mereka adalah yang bermigrasi kerja tanpa menggunakan identitas diri, seperti paspor, visa, dan persyaratan administrasi lain yang pada umumnya diperlukan oleh seseorang dalam bekerja di luar negeri. Pekerja migran pola non-reguler absolut dapat dilakukan, khususnya ke negara tujuan Malaysia, karena mereka dapat masuk dengan menyelundup melalui jalan-jalan tikus di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, yang membentang antara Kabupaten Sangau, di Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara.

Jalur perjalanan ke Malaysia melalui pola migrasi kerja non-reguler absolut dapat ditempuh melalui Selat Malaka, yang membatasi Provinsi Sumatera Utara Indonesia dan Negara Bagian Johor Bahru Malaysia, dengan menyeberang melalui pelabuhan gelap di sepanjang pantai Provinsi Sumatera Utara, yang hanya membutuhkan dua jam pelayaran. Pola migrasi kerja non-reguler absolut dapat dilakukan di Malaysia karena Indonesia-Malaysia memiliki perbatasan geografis fisik daratan langsung sehingga pekerja migran dapat menyeberang secara ilegal. Pola non-reguler absolut tidak dapat dilakukan oleh pekerja migran Sumenep ke Arab Saudi karena antara Indonesia-Arab Saudi tidak memiliki perbatasan fisik geografis secara langsung, sehingga tidak mungkin menyelundup ke Arab Saudi karena harus melewati pemeriksaan sangat ketat di

berbagai bandara dan berbagai negara sebelum mencapai negara tujuan, Arab Saudi.

Dari keterangan informan mantan pekerja migran di Malaysia, semua pekerja migran Sumenep non-reguler absolut terserap dalam bidang kerja perkebunan sawit di Malaysia Barat (Johor Bahru) dan Malaysia Timur (Sabah dan Serawak), karena eksistensi mereka di Malaysia yang tanpa kelengkapan identitas diri secara absolut, sehingga hanya berani berada di tengah belantara perkebunan Malaysia sepanjang waktu sampai kontrak kerjanya habis. Mereka kembali ke Indonesia juga melalui jalur tikus yang sama seperti ketika mereka menyelundup masuk ke Malaysia. Pekerja migran non-reguler absolut dari Sumenep justru lebih disukai majikan di Malaysia, karena di samping upahnya lebih rendah, majikan juga tidak usah membayar “fee” jasa dalam mendatangkan pekerja dari negara lain. Majikan kerja yang merekrut pekerja migran Sumenep non-reguler hanya membayar “fee” kepada *tekong* yang jumlahnya sangat murah, antara 500 sampai 1.000 Ringgit, sedang apabila melalui proses reguler mencapai 8.500 Ringgit di Malaysia dan 8.500 Real di Arab Saudi. Namun dari catatan SBMS, jumlah pekerja migran non-reguler absolut tersebut jumlahnya hanya kecil, tidak lebih lima persen dari keseluruhan pekerja migran Sumenep.

b. Kelembagaan Hubungan Pekerja Migran Sumenep dengan Pihak Terkait

Dari hasil FGD-7 dengan mantan pekerja migran di Kecamatan Guluk-guluk diperoleh informasi, bahwa pilihan pola migrasi ke jemaah haji membawa konsekuensi bagi kelembagaan (institusionalisasi) hubungan pekerja migran dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam proses menjadi pekerja migran, hubungan dengan sesama pekerja migran Sumenep, lembaga pelaksana penempatan dan perlindungan tenaga kerja (PPTKIS), dan *tekong* sebagai perantara dalam penyaluran kerja, majikan penyedia kerja, dan hubungan dengan pemerintah negara asal dan penerima.

Dalam realitas kelembagaan hubungan pekerja migran (reguler dan non-reguler), hubungan dengan pihak-pihak terkait sebagai yang tersaji dalam Tabel 6 berikut tidak berjalan sesuai dengan harapan. PPTKIS yang seharusnya berfungsi sebagai perekut dan pelindung pekerja migran, yang seharusnya memberi pembekalan keterampilan, mengatur kontrak kerja, dan mengantar sampai ke tempat kerja, dan melapor ke KBRI tentang keberadaan pekerja migran yang diurusnya, kenyataannya hanya sebagai penyalur saja. Pekerja migran hanya dilepas sampai bandara negara asal, selebihnya pekerja migran yang harus berpandai-pandai mencari agen penyalur di negara penerima. Ketika pekerja migran menghadapi masalah hubungan kerja (gaji tidak dibayar sesuai perjanjian kerja, dianaya, berkerja melebihi waktu dan tidak mendapat libur) PPTKIS tidak mampu menangani sehingga pekerja migran mengadu ke KBRI. Kehadiran pemerintah yang terepresentasi dalam PPTKIS, dalam memenuhi fungsi penempatan dan perlindungan pekerja migran, menurut hasil FGD yang melibatkan mantan pekerja migran Sumenep, banyak yang tidak berjalan. Dari hasil observasi terhadap eksistensi pekerja migran Sumenep di negara tempat kerja (Arab Saudi dan Malaysia) dan informasi dari mantan pekerja migran Sumenep di daerah asal, dapat disusun bagan tentang dampak eksistensi pekerja migran Sumenep di negara tempat kerja dan daerah asal sebagai yang tersaji dalam Tabel 7 halaman belakang.

Dalam kelembagaan komunitas pekerja migran Sumenep, ternyata ada perbedaan yang mendasar dari dampak eksistensi pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia. Pekerja migran Sumenep di Arab Saudi tidak dapat melakukan kegiatan komunitas secara terbuka karena memang ada larangan bagi semua pekerja dari luar negara untuk berserikat secara terbuka, berarti hak untuk berserikat seperti yang dimaksudkan oleh Cholewinsky (2003: 302) di kalangan pekerja migran Sumenep di Arab Saudi tidak diperoleh. Pekerja migran Sumenep di Malaysia diperbolehkan membentuk komunitas

Tabel 6. Kelembagaan Hubungan Pekerja Migran Sumenep dan Pihak Terkait

Proses dan Hubungan	Pola Migrasi Pekerja Migran Sumenep	
	Reguler Melalui PPTKIS	Non-reguler Melalui <i>Tekong</i>
Proses	Membuat paspor, visa kerja, pendaftaran dan tes keterampilan-pengetahuan oleh PPTKIS, KTKLN, latihan kerja, tanda tangan kontrak kerja, membayar asuransi, kemudian berangkat kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat paspor, visa wisata, dan bekerja ke luar negeri secara ilegal (mandiri) 2. Langsung menyelundup masuk dan bekerja di negara tempat kerja melalui jalur tikus, tanpa paspor dan visa.
Kelembagaan Hubungan dengan Pihak Terkait		
Sesama Pekerja Migran Sumenep di Tempat Kerja	Tidak ada komunikasi, karena langsung masuk dalam pekerjaan dengan jadwal ketat, kecuali kalau mendapat waktu libur.	Ada komunikasi karena berasal dari kaitan keluarga, teman, dan daerah asal. Secara personal mereka saling memantau keberadaannya.
Agen Penggerah Pekerja Migran Negara Asal	Sebagai perekut, penyalur, pelindung sejak keberangkatan sampai kepulangan ke daerah asal, Sumenep.	Tidak ada, karena hubungannya hanya dengan tekong secara perorangan.
Agen Penggerah di Negara Penerima	Penyalur bagi pembutuh jasa tenaga kerja (lembaga atau perorangan)	Tidak ada, karena karena langsung bertemu majikan pengguna jasa kerja
Pengguna Jasa di Negara Penerima	Lembaga/majikan sebagai penyedia kerja dan upah, pekerja sebagai penyedia tenaga kerja	Hubungan pribadi majikan-pekerja
Pemerintah Negara Asal	Tercatat, tersalurkan, dan terlindungi secara formal oleh pemerintah melalui PPTKIS dan lembaga asuransi	Tidak diketahui, kecuali tercatat sebagai warga Indonesia yang berwisata ke luar negeri, atau secara diam-diam menyelundup ke luar negeri.
Pemerintah Negara Tempat Kerja	Diketahui dan dicatat sebagai pekerja dari luar (migran) dengan identitas diri berupa <i>iqama</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diketahui, kecuali sebagai wisatawan yang sedang berkunjung ke Arab Saudi dan Malaysia 2. Apabila diketahui, ditangkap, dihukum kurungan atau denda, dideportasi.

Sumber: Hasil FGD-7 Sumenep (2014)

secara terbuka, sehingga eksistensi pekerja migran Sumenep di Malaysia dapat mewujudkan kebiasaan ekonomi “mikro” seperti di daerah asal, terutama dalam hal dapat memperoleh makanan khas Sumenep (Nasi Kaldhu), membawa kiai sebagai pencerah rokhani komunitas pekerja migran Sumenep, bahkan dapat merokok dengan rokok khas kesukaan orang Sumenep yang biasanya hanya didapat di Madura.

Di daerah asal Sumenep sendiri, anggota solidaritas buruh migran dapat membentuk lembaga sosial ekonomi dalam memperkuat jalinan pekerja migran, mantan, dan calon generasi migran berikutnya, meskipun tidak semua tercatat dalam SBMS, tetapi sejak 2008-2014 tercatat 778 anggota dalam status aktif

(mengikuti kegiatan lembaga) dan pasif (hanya mencatatkan diri saja). Dari pengamatan terhadap kegiatan mingguan anggota aktif SBMS, keunikan sistem keanggotaan SBMS memakai sistem longgar (*loose*), dalam arti keanggotaan dapat digantikan oleh anggota keluarga (suami/istri atau anak) untuk mewakili anggota, terutama apabila anggota inti absen dari kegiatan, biasanya dikarenakan anggota inti kembali bekerja ke Arab Saudi atau Malaysia. Apabila mengacu pada Sugiyanto (2002: 36), eksistensi SBMS di Kabupaten Sumenep, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi, sudah dapat dikategorikan lembaga, karena bagaimana pun sistem keanggotaannya sebuah organisasi memenuhi unsur-unsur yang disebut lembaga, apabila memiliki

Tabel 7. Dampak Eksistensi Pekerja Migran di Tempat Kerja dan Daerah Asal

Dampak	Negara Tempat Kerja	
	Arab Saudi	Malaysia
Kelembagaan Sosial penduduk Sumenep	Komunitas tertutup (saling melindungi, memberi informasi kerja)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas Terbuka (saling melindungi, memberi informasi kerja) 2. Kegiatan keagamaan lingkup terbatas dari Orang Sumenep sendiri
Kelembagaan Ekonomi penduduk Sumenep	Tidak ada	Kegiatan ekonomi lingkup terbatas Penduduk Sumenep (Penjual dan pembeli kebutuhan makan-minum (Nasi Kaldhu, rokok <i>Tumpeng</i> khas Madura)
Dampak	Daerah Asal	
Kelembagaan Sosial penduduk Sumenep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya solidaritas pekerja migran (SBMS), melakukan advokasi bagi yang bermasalah, pemberdayaan pra-pascakerja. 2. Tumbuhnya jaringan sosial dengan lembaga lain dalam penguatan eksistensi SBMS 	
Kelembagaan Ekonomi penduduk Sumenep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya wadah bagi pemasaran hasil pertanian 2. Tumbuhnya usaha ekonomi kreatif bersama 3. Tumbuhnya jaringan dengan kelembagaan ekonomi lain 	

Sumber: Hasil FGD-7 (2014)

tradisi tertulis berupa catatan administrasi anggota dan kegiatan anggota, memiliki tujuan fungsi dan tata tertib meskipun bersifat longgar, memiliki pola pemikiran yang termanifestasi dalam aktivitas-aktivitas yang jelas, eksis dalam kurun waktu yang lama (tidak sementara), dan memiliki simbol sebagai penanda.

Apabila dianalogikan dengan indikator suatu lembaga menurut Sugiyanto, eksistensi SBMS juga memiliki kategori yang diperlukan bagi eksistensi lembaga, seperti sumberdaya manusia (keanggotaan mantan pekerja migran dan anggota keluarganya), ekonomi (modal iuran dan barang dagangan yang dibawa anggota dalam setiap pertemuan dan komoditas hasil bumi dan produk *home industry*), informasi (yang berkaitan dengan usaha, kondisi kerja dan budaya di negara tujuan), kekuatan dan wewenang (kemampuan melakukan advokasi bagi mantan dan pekerja migran dari Sumenep yang memiliki masalah hubungan kerja), keabsahan (diakui oleh lembaga lain utamanya di antara sindikasi lembaga-lembaga peduli pekerja migran di level nasional dan internasional, dukungan dari pekerja migran, mantan, dan calon dari Sumenep, meluas ke anggota keluarganya); memiliki kepemimpinan; doktrin, yang jelas-jelas bertujuan melakukan advokasi bagi pekerja migran

tanpa mengharapkan keuntungan materi; dan memiliki program dalam bentuk kegiatan sosial (pendidikan dan advokasi terhadap eksistensi pekerja migran, serta program ekonomi berbasis penggunaan uang remitan untuk tujuan ekonomi-produktif). (Sugiyanto, 2002: 82-86).

c. Pulang Membangun Citra Kehidupan Baru

Apabila pada awalnya bermigrasi kerja karena semata-mata dorongan sumberdaya alam dan kondisi infrastruktur Sumenep yang miskin dan tidak memadai (Jonge, 1989: 45), sejak hasil bekerja penduduk Sumenep di luar Madura selalu dikonotasikan dengan kemampuan ekonomi yang meningkat dibandingkan ketika belum bermigrasi, citra penduduk Sumenep yang telah bermigrasi kerja ketika kembali di daerah asal kemudian berubah (naik). Sejalan dengan perjalanan waktu dan perkembangan nilai sosial budaya Sumenep, apabila seseorang mampu bermigrasi keluar Madura, apapun hasilnya, citranya akan menjadi lebih baik dibandingkan hanya bertahan hidup di daerah asal, karena penduduk yang mampu bermigrasi kerja kebanyakan dapat lepas dari status petani miskin dan berlahan sempit, bahkan kepemilikan hartanya meningkat.

Menurut Wiyata (2013), citra tersebut ke-mudian biasanya ditunjukkan secara eksplisit (*show off*) di tengah masyarakat lingkungannya, yang dalam konteks ini adalah setelah penduduk Sumenep pulang dari bermigrasi kerja. Dari hasil observasi di kantong-kantong pekerja migran Sumenep, citra kehidupan baru setelah menjadi pekerja migran tersebut dapat dibangun melalui tiga basis. Pertama, kepemilikan harta benda rumah tangga modern, seperti rumah bagus, televisi, mobelair, kulkas, kompor gas/listrik, *juice blender*, tempat tidur, video player, sepeda motor, telpon seluler. Kedua, kepemilikan usaha baru setelah kembali ke daerah asal, lepas dari status semula yang rata-rata petani miskin. Pekerja migran Sumenep yang tidak mampu membangun usaha di daerah asal biasanya akan kembali sebagai pekerja migran sampai kondisi fisik memungkinkan untuk tetap bisa menunjukkan dan membiayai kemampuannya memiliki perabotan rumah modern. Ketiga, kemampuan memberi donasi untuk kemanfaatan umum, seperti ikut menyumbang dalam pembangunan masjid, lembaga pendidikan, dan infrastruktur jalan desa. Dari kompilasi data yang tercatat di SBMS, eksistensi pekerja migran Sumenep antara tahun 2008 sampai dengan 2014, melalui donasi sebagian uang remiten dapat diwujudkan dalam tiga tiga jenis fasilitas umum, meliputi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan infrastruktur jalan desa seperti yang tersaji dalam Tabel 8.

Tabel 8. Fasilitas Umum Karya Pekerja Migran

No	Jenis Fasilitas Umum	Satuan
1	Masjid	17 buah
2	Lembaga Pendidikan	3 buah
3	Jalan Desa	17 km

Sumber: Catatan SBMS (2008-2014)

Hal yang membedakan eksistensi pekerja migran Sumenep terdahulu (bersifat regional) dengan yang berlingkup internasional (ke Arab Saudi dan Malaysia) adalah pada aspek pembe-rian dampak nyata pada pembangunan fasilitas

umum di daerah asal, juga dalam membentuk solidaritas buruh migran Sumenep (SBMS). Kalau semula pekerja migran Sumenep tidak sempat mempedulikan kondisi dan masyarakat daerah asal, pekerja migran Sumenep khususnya yang ke Arab Saudi dan Malaysia mulai mem-pedulikan kondisi dan masyarakat daerah asal, termanifestasi dalam terbentuknya SBMS yang bergerak dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Kelembagaan solidaritas tersebut dibentuk dari pertimbangan banyaknya kuantitas pen-duduk Sumenep yang bermigrasi kerja dan mem-butuhkan forum komunikasi intens antara yang bekerja di luar negeri, masyarakat daerah asal sebagai calon dan mantan migran kerja, dan lembaga lain yang peduli pada eksistensi pekerja mi-gran, baik dari aspek keberdayaan sosial maupun ekonomi. Dalam bidang sosial, SBMS memberi pendidikan keterampilan, pengetahuan tentang kondisi sosial budaya negara tujuan, dan tata cara memenuhi syarat administrasi menjadi pekerja migran bagi calon pekerja migran, agar mereka tidak mengalami keterkejutan, kecanggungan, dan gagap budaya di negara tempat kerja.

SBMS juga memberi pelayanan, perlindungan, dan advokasi bagi pekerja migran Sumenep, bersindikasi dengan lembaga berskala nasional, dan internasional peduli pekerja migran. SBMS juga memberi ruang komunikasi bagi pekerja migran, mantan, dan calon pekerja migran dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman. Hasil kegiatan nyata penanganan SBMS di bidang sosial sejak 2008-2014 dapat dideskripsikan dalam Tabel 9.

SBMS yang bergerak dalam kegiatan eko-nomi produktif secara berkelompok memiliki kegiatan memfasilitasi alternatif kegiatan eko-nomi berbasis potensi lokal, dimulai dengan pe-nyediaan ruang pemasaran hasil bumi sehingga mantan pekerja migran yang kembali bekerja disektor pertanian di daerah asal dapat men-jual hasil bumi langsung ke konsumen guna mendapatkan margin keuntungan maksimal dan terbebas dari sistem penjualan hasil bumi secara *ijon* (menjual sebelum masa panen sehingga

Tabel 9. Kasus Penanganan Bidang Sosial SBMS

No	Jenis Permasalahan	Frekuensi	Hasil	
			Teratasi	Tidak Teratasi
1	Gaji tidak dibayar penuh	31	9	33
2	Penganiayaan oleh Majikan	11	8	3
3	Klaim asuransi	17	7	10
4	Hutang-piutang	23	23	16
5	Penipuan menjadi Pekerja Migran	4	3	1
	Jumlah Kasus	71	50	63

Sumber: Hasil Kompilasi Penanganan SBMS (2008-2014)

harga sangat rendah). SBMS juga menyalurkan pemasaran usaha ekonomi produktif ke luar Sumenep dan menghubungkan dengan berbagai lembaga berskala nasional dan internasional yang peduli pada usaha mikro.

Semua kegiatan ekonomi SBMS tersebut memiliki tujuan akhir untuk menghambat laju migrasi kerja penduduk Sumenep agar dapat mengubah citra umum bahwa bermigrasi kerja keluar Madura merupakan satu-satunya upaya perubahan citra kehidupan, tetapi bertahan memanfaatkan potensi lokal Sumenep juga merupakan salah satu alternatif dari upaya perubahan citra diri seiring dengan perkembangan Sumenep sebagai daerah yang memiliki berbagai potensi lokal menjanjikan. Mantan pekerja migran Sumenep secara individual yang dapat menggunakan uang hasil kerjanya untuk usaha ekonomi produktif, menurut catatan yang berhasil disusun oleh SBMS, dapat dideskripsikan dalam Tabel 10.

Kategori usaha bersama tumbuh, kembang, dan maju mengacu pada Panduan Umum Usaha Ekonomi-produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, kategori tumbuh ditandai dengan memiliki administrasi kegiatan, struktur organisasi, pasaran produk yang masih terbatas, aset terbatas, dan usia yang tidak lebih setahun. Kedua, kategori kembang ditandai dengan administrasi usaha yang lengkap dan konsisten, organisasi yang berfungsi aktif, pemasaran luas (keluar kabupaten/kota), aset permodalan dan usaha kuat dapat membiayai produksi. Ketiga, kategori maju ditandai dengan status badan hukum formal, relasi dengan bank dalam pengelolaan aset usaha, dan pemasaran yang lebih luas keluar provinsi (Istiana Hermawati, 211: 17).

Jenis usaha ekonomi produktif yang dilakukan secara berkelompok oleh mantan pekerja migran Sumenep yang disajikan dalam Tabel 10 dapat dideskripsikan sebagai: Usaha minu-

Tabel 10. Jenis Usaha Mantan Pekerja Migran Sumenep

No	Jenis Usaha	Jalannya Usaha			Jumlah
		Tumbuh	Kembang	Maju	
1	Minuman Siwalan	9	2	-	11
2	Makanan kecil	15	7	9	31
3	Jual beli motor	7	13	2	22
4	Travel	3	-	-	3
5	Kerajinan rumah tangga	18	13	10	41
6	Pertanian	46	47	6	99
7	Toko kelontong	29	36	13	78
8	Toko kebutuhan sehari-hari	21	34	17	72
9	Pembuatan mebel	5	6	-	11
10	Perahu nelayan	3	4	-	7
	Jumlah	156	138	57	375

Sumber: Solidaritas Buruh Migran Sumenep (2014)

man Siwalan merupakan pembotolan (*bottleing*) minuman kemasan yang dilakukan bekerja sama dengan lembaga Stafak dari Bogor. Makanan kecil merupakan makanan khas Kabupaten Sumenep dalam bentuk kerupuk. Jual beli motor merupakan usaha menjual dan juga membeli sepeda motor, termasuk tukar tambah sepeda motor bekas. Usaha travel termanifestasikan dalam bentuk persewaan mobil wisata. Kerajinan rumah tangga merupakan pembuatan suvenir, seperti gantungan kunci, cicin, anting-anting yang terbuat dari cangkang kerang dan kayu. Usaha pertanian termanifestasi dalam budidaya tembakau, jagung, melon, timun, sayuran, dan padi. Usaha toko termanifestasi dalam toko kebutuhan sehari-hari dan kelontong. Usaha permebelan merupakan usaha pembuatan meja, kursi, bufet, almari terbuat dari kayu.¹¹

Tingkat kemajuan usaha yang dilakukan oleh mantan pekerja migran Sumenep dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, usaha baru mengalami pertumbuhan apabila penjualan hasil usaha baru meliputi lingkungan kecamatan setempat, kuantitas penjualannya juga belum tetap, dan keuntungan dari hasil usahanya belum cukup untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Kedua, usahanya mulai mengalami perkembangan apabila kuantitas penjualannya sudah menetap, mencakup wilayah kabupaten Sumenep setempat, dan hasil keuntungannya sudah dapat untuk menopang kesinambungan usaha. Ketiga, usaha dinilai maju apabila kuantitas penjualannya meningkat dari bulan ke bulan, manjarkan sampai luar daerah Sumenep, bahkan Madura, dengan tingkat keuntungan yang dapat digunakan untuk memperbesar dan mem-

buka cabang usaha. Capaian kegiatan ekonomi kelompok usaha bersama (KUB) SBMS 208-2014 dapat dilihat dalam Tabel 11.

Sejalan dengan mobilitas pekerja migran Sumenep yang tinggi, keunikan keanggotaan pekerja migran Sumenep dalam forum kegiatan sosial dan ekonomi SBMS dapat diwakili oleh anggota keluarganya, terutama apabila anggota sedang berhalangan hadir karena suatu keperluan atau bekerja lagi keluar Madura sebagai pekerja migran, sistem keanggotaan tersebut apabila di-analogikan dengan teori sosiologi (Blau, 1977: 165), dapat dikategorikan sebagai kelembagaan sosial yang masih subjektif (*subjective sosial institution*), walaupun masing-masing anggota memiliki keterikatan emosional yang tinggi.

Seiring dengan perkembangan waktu, Kabupaten Sumenep memang telah berubah menjadi daerah yang potensial untuk berbagai kegiatan usaha. Eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumenep telah berhasil menemukan sumber daya alam yang sangat prospektif untuk menahan laju migrasi penduduk Sumenep, seperti penemuan tambang minyak dan gas alam (Kepulauan Kengean), penemuan pulau Aang yang memiliki kandungan O2 nomer dua terbesar di dunia, dan pemanfaatan tiga sungai besar (Kebonagung, Saroko, Tambakagung) menjadi sungai dengan sistem irigasi yang mampu mengairi dan meningkatkan secara signifikan kesuburan tanah pertanian di Kabupaten Sumenep, menjadi kabupaten yang relatif lebih subur dibandingkan tiga kabupaten lainnya di Madura.

Pekerja migran Sumenep terdahulu yang bersifat regional belum pernah mencapai kemampuan untuk membentuk solidaritas buruh

Tabel 11. Capaian Kelompok Usaha Mantan Pekerja Migran Sumenep

No	Kelompok (Desa)	Jenis Usaha (Pokok)	Aset Kekayaan(Rp)	Aset Barang (dari Usaha Ekonomi Kreatif)
1	Gadhu	Kue	70.000.000,-	Alat Pembuat Kue-kue
2	Bragung	Tempe dan tahu	50.000.000,-	Alat Pembuat Tahu/tempe
3	Duddang	Jamu Instan	57.000.000,-	Alat Pembuat Jamu Instan
4	Sekarduluk	Minuman Buah dan Gula Merah	103.000.000,-	Mesin Selep Kelapa; Alat Pembuat Minuman Buah; Mesin Pembuat Gula Merah

Sumber: Hasil Kompilasi Kegiatan SBMS (2014)

migran (SBMS) yang dapat menjalin komunikasi antarpekerja migran Sumenep di luar negeri, antarmantan pekerja migran, dan calon pekerja migran, dan menjalin hubungan dengan lembaga lain dalam memperkuat eksistensi mereka. Capaian eksistensi dalam melakukan kerja sama dengan lembaga lokal, regional, nasional, dan internasional tersebut dapat dilihat dalam Tabel 12.

Secara umum, eksistensi pekerja migran yang tercatat sejak 2008-2014, baik yang sedang maupun mantan, mencapai 4.000 orang (Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Timur, 2014), 788 pekerja migran berkomunikasi secara aktif dengan SBMS. Dari hasil observasi di kantong-kantong pekerja migran ternyata memiliki dampak sosial ekonomi yang meliputi berbagai aspek. Pertama, rumah-rumah mewah tanpa penghuni karena ditinggal bermigrasi kerja pemiliknya. Kedua, fenomena rumah yang dihuni oleh jamal (Janda Malaysia) atau dumal (Duda Malaysia) karena ditinggal pergi ke Malaysia.¹² Ketiga, anomali harga tanah yang termanifestasikan dalam harga tanah yang dapat lebih mahal di daerah kepulauan dibandingkan dengan harga di ibukota Kabupaten Sumenep, karena pekerja migran lebih suka membeli tanah di kampungnya sendiri, agar

terlihat nyata demi mengubah citra diri mereka, dibandingkan membeli tanah di pusat kota Sumenep yang tidak akan terlihat oleh masyarakat asalnya, meskipun tanah tersebut di pelosok desa atau kepulauan. Keempat, pengeringan sumberdaya manusia potensial keluar Sumenep, karena terlanjur terbentuknya citra bekerja keluar Madura lebih tinggi dibandingkan bekerja di Sumenep, sehingga pertokoan, warung, usaha banyak dikuasai oleh penduduk luar Sumenep dibandingkan dengan yang dikuasai penduduk Sumenep sendiri.

Apabila dianalisis menurut Armour (dalam Vanclay, 2003: 3), dampak sosial dan ekonomi dari eksistensi pekerja migran Sumenep tersebut merupakan dampak sosial positif, karena menemukan moda ekonomi baru, pola pergaulan baru (relasi), keeratan hubungan sosial antarpekerja migran Sumenep, dan dengan lembaga sosial ekonomi dari luar Sumenep, Madura sehingga dapat meningkatkan survivalisasi pekerja migran Sumenep dengan perkembangan kehidupan, meskipun dampak sosial tersebut masih dalam tahap awal pertumbuhan. Dampak sosial negatif dari sederetan indikator menurut Scott (1985: 322; Tainter, 1990: 634; Hirschman, 1970: 11) hanya berupa larinya sumber daya manusia se-

Tabel 12. Capaian Kerjasama SBMS dengan Lembaga Lain

No	Nama Lembaga	Bidang Kerjasama	Level Organisasi
1	ILO	- Pemberdayaan Ekonomi - Penelitian HIV-AIDS - Pendidikan Manejemen Keluangan (Kooperasi)	- Internasional
2	Solidaritas Perempuan	- Advokasi Perempuan - Pendidikan Hak Perempuan Pekerja Migran - Pendidikan Basis (Menejemen Keluarga) - Pendidikan Penguatan Partisipasi Politik Perempuan	- Nasional
3	Cakrawala Timur	- Pendidikan Perempuan dalam Perolehan APBDes	Nasional
4	Cifas	- Ekonomi Kreatif (Pembuatan Makanan dan Minuman)	Nasional
5	HWPRT	- Kegiatan Ekonomi Perempuan dengan Modal Bergilir	Regional
6	Cakram Asia	- Pemahaman dan Penyadaran Bahaya HIV-AIDS di Tempat Kerja dan Daerah Asal	- Internasional
7	SBMI	- Perlindungan Keberangkatan, di Tempat Kerja, Kepulangan, dan Klaim Asuransi	Nasional
8	<i>We Care Asia</i>	- Pemahaman dan Penyadaran Kekerasan terhadap perempuan	Internasional
9	Rembug Perempuan	- Keorganisasian Perempuan Perdesaan - Keorganisasian Perempuan Perdesaan	Regional
10	BPM Anokayah	- Lembaga Keuangan Mikro	Lokal

Sumber: Hasil Kompilasi Kegiatan SBMS (2014)

mentara waktu ketika penduduk Sumenep sedang bermigrasi, tetapi karena pola migrasi pekerja migran Sumenep tetap menjalin hubungan intens dengan masyarakat daerah asal, larinya SDM tersebut hanya bersifat sementara, bahkan perubahan peran anggota keluarga dalam struktur keluarga pun tidak terjadi, sehingga keutuhan sosial budaya masyarakat Sumenep, khususnya di kalangan pekerja migran, tetap terjaga.

D. Penutup

Hasil kajian empirik pola migrasi kerja pekerja migran Sumenep dapat disimpulkan, bahwa pola migrasi pekerja migran Sumenep, Madura, ke Arab Saudi dan Malaysia, terbagi menjadi tiga kelompok. **Pertama**, mereka yang memilih pola reguler, cenderung dilakukan oleh sedikit penduduk Sumenep yang memiliki bekal pendidikan dan ekonomi cukup untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemerintah melalui Undang-undang No 39 tahun 2004 dan diurus melalui PPTKIS, kebanyakan dilakukan oleh pekerja migran Sumenep dari wilayah kota yang memiliki pengaruh struktur kemasyarakatan keraton, serta mereka memiliki motivasi untuk mencari pengalaman dan membangun relasi dengan majikan kerja di negara tujuan. **Kedua**, pola non-reguler, dilakukan oleh kebanyakan pekerja migran Sumenep, direspon dan dimaknai positif oleh pekerja migran Sumenep karena dimediasi oleh *tekong* pekerja migran Sumenep pendahulu (*pioneer migrants*), sehingga hubungannya lebih familier (akrab), mudah, murah, cepat, dan praktis, bahkan dapat bergabung dengan komunitas Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia. Pola non-reguler juga tidak harus memiliki bekal pendidikan dan ekonomi cukup seperti kalau melalui regulasi pemerintah, cenderung dilakukan oleh penduduk pelosok daratan dan kepulauan. **Ketiga**, dalam jumlah sedikit, mereka yang memilih jalur non-reguler absolut, yang tidak memiliki bekal cukup atau tidak mau membayar persyaratan administrasi umum masuk ke negara lain (paspor dan visa). Pekerja migran non-reguler absolut hanya ada di Malaysia, masuk melalui jalur penyelundupan

(jalan-jalan *tikus*), dan selama kerja tinggal di tengah belantara perkebunan agar tidak terkena razia petugas imigrasi.

Kedatangan pekerja migran Sumenep dari tahun-ke tahun (2008-2014), baik yang melalui pola reguler maupun non-reguler terakumulasi dalam komunitas pekerja migran tertutup di Arab Saudi dan komunitas terbuka di Malaysia, sehingga dapat menjalin komunikasi intens antar-anggota dan keluarga di daerah asal melalui forum komunitas di negara tujuan dan SBMS di daerah asal, yang dampaknya dapat menumbuhkan lembaga sosial dan ekonomi di daerah asal dalam rangka: membekali pengetahuan dan keterampilan calon pekerja migran; berbagi pengalaman antara mantan dan calon migran; memperkuat eksistensi komunitas pekerja migran Sumenep dalam lingkup internasional melalui pelembagaan hubungan dengan lembaga lain berskala lokal, regional, nasional, dan internasional; dan memfasilitasi alternatif kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal dalam menghambat laju migrasi penduduk Sumenep keluar Madura.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor penarik (*pull factor*) penduduk Sumenep menjadi pekerja migran di luar negeri, khususnya ke Negara Arab Saudi: Pertama, karena upah kerja yang yang ditawarkan lebih besar dibandingkan dengan upah kerja pada umumnya di dalam negeri. Kedua, Negara Arab Saudi identik dengan Mekah, tempat suci yang menjadi penyempurnaan rukun Islam yang kelima, agama yang dipeluk oleh hampir semua penduduk Sumenep, sehingga Arab Saudi dan Mekah memiliki makna tersendiri bagi penduduk Sumenep, dapat didatangi sambil bekerja dan berhaji, meskipun anangan-angan tersebut banyak yang tidak tercapai, karena selama menjalani kontrak kerja di Arab Saudi, jarang pekerja migran Sumenep diizinkan cuti untuk berhaji.

Faktor penarik (*pull factor*) penduduk Sumenep bermigrasi kerja ke Malaysia: Pertama, Malaysia Timur (Sabah dan Serawak) sangat dekat dan berbatasan dengan Kalimantan, dan bahasa masyarakatnya mirip dengan bahasa yang digu-

nakan di Indonesia (Melayu), sehingga Malaysia Timur menjadi daerah tujuan migrasi pengganti bagi pekerja migran Sumenep yang semula bekerja di Kalimatan, karena Malaysia Timur sangat berbatasan dengan Kalimantan, sehingga mudah jangkauannya. Penduduk Sumenep yang menjadi pekerja migran ternyata kurang merespons positif regulasi dari pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang No 39 tahun 2004 (tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia), mereka lebih merespons pola non-reguler yang dimediasi *tekong*, yang masih saudara, tetangga, atau teman sesama Sumenep.

Sindikasi individual non-formal pekerja migran-*tekong*-majikan tersebut sudah berlangsung lama sebelum kebijakan regulasi oleh pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia dikeluarkan, sehingga regulasi pemerintah melalui Undang-undang No 39 tahun 2004 dianggap oleh pekerja migran Sumenep sebagai mengganggu kenyamanan proses menjadi pekerja migran yang sebelumnya telah biasa dilakukan oleh pekerja migran Sumenep. Dari pemakaian subjektif penduduk Sumenep pola reguler prosedurnya berbelit-belit, formal, biaya mahal, membutuhkan waktu lama, dan sulit dipenuhi oleh kondisi rata-rata calon pekerja migran dari Sumenep, bahkan ketika ada pekerja migran Sumenep yang memilih jalur reguler ternyata pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pun belum dapat menjamin kenyamanan penempatan, perlindungan, dan jaminan (asuransi) seperti yang dijanjikan.

Pekerja migran Sumenep cenderung merespons *tekong*, yang ternyata adalah saudara, tetangga, teman sesama Sumenep sebagai perantara dengan majikan pengguna jasa kerja karena lebih menawarkan syarat yang praktis, mudah, biaya rendah, akrab, dan memiliki jalinan emosional karena sesama asal Sumenep, bahkan biaya administrasi dapat lebih dulu dipinjami oleh *tekong*. Dari aspek hubungan informal antarindividu (pekerja migran dan *tekong*) terjadi hubungan sosiologis fungsional, dalam arti hubungan fungsional yang menguntungkan

karena fungsi masing-masing. *Tekong* memperoleh keuntungan karena memediasi pekerja migran Sumenep memperoleh pekerjaan, pekerja migran memperoleh keuntungan karena dapat bermigrasi kerja di arab Saudi dan Malaysia dengan upah tinggi dan biaya murah, praktis, dan cepat. Majikan pembutuh jasa kerja juga tidak harus membayar komisi (*fee*) yang mahal untuk mendatangkan pekerja migran.

Pekerja migran Sumenep lebih merespons *tekong* karena mampu memberi gambaran tentang sosok majikan tempat kerja, dapat mempertemukan dengan komunitas sesama daerah asal Sumenep, memberi kepercayaan diri karena diurus oleh orang dari lingkungan saudara, tetangga, atau teman sesama penduduk Sumenep (*taretan semma*’). Dari sisi majikan pengguna jasa tenaga kerja di negara tujuan, tenaga kerja yang diperoleh dari *tekong* jauh lebih murah biayanya dan dapat memesan kualifikasi secara personal sosok pekerja migran sesuai dengan yang diinginkan, sedang apabila melalui jalur reguler majikan harus membayar komisi (*fee*) yang mahal kepada lembaga (agen) penyedia tenaga kerja, baik di Indonesia maupun di negeri sendiri, bahkan belum tentu pekerja migran yang didapatnya sesuai dengan keinginan.

Refleksi terhadap kajian dan teori terdahulu yang bertitik tolak dari temuan empirik hasil penelitian tentang pola migrasi kerja pekerja migran Sumenep di Arab Saudi dan Malaysia, ternyata hasil penelitian dan teori terdahulu berbeda dibandingkan sekarang, khususnya yang menyangkut pekerja migran dari Sumenep, Madura. Perbedaan tersebut karena adanya perkembangan kondisi yang menyangkut migran Sumenep, yang terintervensi kelembagaan formal (PPTKIS) dan informal (*tekong*), tertarik permintaan pasar kerja, lingkup migrasi yang tidak lagi bersifat regional, dan perbedaan perkembangan varian karakter antarpenduduk di empat kabupaten Madura, khususnya pekerja migran Sumenep dengan dampak eksistensi yang menonjol, terefleksi dalam Bagan 2.

Mengacu pada Bagan 2 dapat diketahui bahwa kondisi pekerja migran Sumenep, se-

Bagan 2. Refleksi Perbedaan Hasil Kajian dan Teori Terdahulu dengan Sekarang

Kajian	Hasil Penelitian Tesis Terdahulu	Perkembangan Kondisi	Hasil Penelitian Tesis Baru (sekarang)
1. Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola migrasi dan Sterio tipe kerja migran Madura terbatas 2. Arah migrasi tegak lurus secara geografis mengikuti pendahulunya 3. Cakupan migrasi: Regional 4. Menyamakan karakter migran Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) 5. Migrasi swadaya 6. Varian motivasi terbatas (tekanan daerah asal dan agama) 7. Tidak ada pihak terkait dengan migrasi 8. Survivalisasi kehidupan mengikuti pendahulu 9. Penduduk Sumenep masih terkooptasi dalam entitas masyarakat Madura 10. Tidak membawa dampak sosial ekonomi di daerah asal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasionalitas pilihan pekerjaan yang menguntungkan, lepas dari tradisi pendahulu. 2. Intervensi kelembagaan formal (PPTKIS) dan informal (<i>tekong</i>) 3. Permintaan pasar kerja 4. Luas migrasi: Internasional 5. Perbedaan varian perkembangan karakter antarempat kabupaten di Madura. 6. Memfokuskan Sumenep sebagai karakter migran yang menonjol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola migrasi dan sterio tipe kerja variatif 2. Arah migrasi ke pasar kerja 3. Cakupan migrasi: Internasional, kecenderungan ke Arab Saudi dan Malaysia 4. Membedakan karakter pekerja migran masing-masing kabupaten di Madura 5. Migrasi bermediasi 6. Varian motivasi variatif 7. Banyak pihak terkait (pemerintah negara asal dan tujuan, PPTKIS, tekong, majikan, sesama migran Sumenep di negara tujuan, lembaga peduli migran). 8. Survivalisasi kehidupan di negara tujuan bersifat rasional 9. Penduduk Sumenep merupakan entitas tersendiri. 11. Membawa dampak sosial ekonomi daerah asal
2. Teori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermigrasi karena dorongan alam yang miskin 2. Infrastruktur internal terbatas untuk mobilitas 3. Modal sosial penghambat migrasi 4. Migrasi membawa perubahan peran dalam struktur keluarga 5. Penduduk Sumenep tidak berbeda dengan penduduk kabupaten lainnya di Madura. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan populasi mukimin Sumenep di negara tujuan 2. Berbagi keberhasilan dengan sesama daerah asal 3. Penguatan komunitas migran di negara tujuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermigrasi karena dorongan alam, konflik sosial, permitaan pasar kerja, ekonomi, peningkatan citra dan penguatan komunitas. 2. Infrastruktur memadai untuk mobilitas bermigrasi 3. Modal sosial justru dibawa ke negara tujuan kerja 4. Migrasi tidak membawa perubahan peran dalam struktur keluarga 5. Masyarakat Sumenep memiliki varian perkembangan karakteristik yang berbeda dibandingkan penduduk kabupaten lainnya di Madura

jalan dengan perkembangan zaman sudah berbeda dibandingkan dengan kondisi migran kerja terdahulu, bahkan teori yang mengungkap tentang timbulnya gejala sosial pekerja migran juga berubah, kadang-kadang memiliki logika terbalik, dibandingkan hasil kajian empirik dan aksioma tentang kemigrinan terdahulu. Be-

rangkat dari realitas pola migrasi kerja pekerja migran Sumenep ke Arab Saudi dan Malaysia, hasil penelitian dan teori kepekerjaan migran perlu dikaji ulang dalam lingkup yang tidak hanya terbatas pada Kabupaten Sumenep, tetapi di daerah lain yang memiliki potensi dan permasalahan sama.

Footnotes

- ¹⁾ BP3TKI untuk data pekerja migran Sumenep pola reguler, lembaga ke lembaga. Kantor Imigrasi Jawa Timur untuk menghitung penduduk Sumenep yang memohon paspor dan visa wisata, tetapi sebenarnya untuk bekerja secara non-reguler, khususnya penduduk miskin dan berpendidikan rendah yang mengajukan paspor untuk berwisata.
- ²⁾ Perbandingan jumlah pekerja migran Madura yang bekerja di luar negeri melalui pola reguler dikutip dari data pengiriman pekerja migran asal Madura di BP3TKI Provinsi Jawa Timur, sedang jumlah pekerja migran Madura yang melalui pola non-reguler dihitung dari permohonan paspor (*non-working passport request*) dari orang Madura usia produktif di Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Timur. Dari penelusuran empirik, semua permohonan paspor orang Madura yang dilakukan oleh orang dalam usia produktif, perizinannya tidak digunakan untuk bekerja, tetapi pada prakteknya digunakan untuk bekerja di luar negeri.
- ³⁾ Perspektif humanistik lebih menekankan bukan pada objektivitas analitik-empirik-logik, melainkan menekankan pada sikap empati, pemahaman subjektif pada orang, kelompok, masyarakat yang diteliti, dan sebagai alternatif dalam melakukan konstruksi ilmu pengetahuan dari sisi “orang lain”. Rogers (2008: 329) menggunakan istilah pernilaian antarsubjek, *intersubjektive verification*. Perspektif humanistik terejawantah dalam penelitian sosiologi dengan metode analisisnya yang tidak mekanistik, teknis, abstrak, tetapi lebih menekankan pada analisis sosial dalam rangka “melakukan pelayanan sosial” melalui deskripsi, demistikasi teori, dan kritik (Lee, 1978: 62). Plumer (dalam Marshall, 1998: 1) menggariskan empat kriteria sosiologi humanistik: Pertama, menghormati subjektivitas dan kreativitas manusia melalui pengungkapan cara seseorang merespons tekanan sosial, dan secara aktif hidup bersama dalam dunia sosial. Kedua, menitikberatkan perhatian pada pengalaman konkret manusia dari hasil percakapan, pengamatan perasaan, dan perbuatan dalam organisasi sosial ekonomi. Ketiga, mengungkap kondisi orang secara akrab, kekeluargaan, dan alami. Keempat, memiliki kesadaran moral dan peran politik dalam menggugah (orang) ke dalam struktur sosial bebas dari penekanan, penindasan, dan ketidakadilan. Ciri penelitian sosiologis humanistik tersebut juga merupakan esensi dari tulisan Berger (1963: 66-93) yang mengemukakan bahwa sosiologi humanistik bukan merupakan pembuktian teori ke alam empirik (empirisasi) melainkan sebuah kajian yang merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu sejarah, budaya, dan sosiologi sendiri. Dalam konteks penelitian ini perspektif humanistik dilakukan untuk membuat kajian secara empati menurut pemahaman subjektif (dalam konteks ini pekerja migran Sumenep dalam memper-
- tahankan eksistensi kehidupannya sebagai pekerja migran di luar negeri, Arab Saudi dan Malaysia) dan dampaknya bagi kelembagaan sosial dan ekonomi, baik yang tumbuh di negara tempat kerja maupun di daerah asal. Pilihan perspektif metodologi tersebut membawa konsekuensi pada metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif-kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertumpu pada (*rely on*) keterampilan peneliti dalam melakukan wawancara dan observasi secara empati untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dalam penelitian kualitatif lazim dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructure*) yang dimaksudkan semata-mata untuk memancing cerita dan pengalaman informan tentang masalah tertutup. Observasi dalam penelitian kualitatif juga lazim dilakukan (David Jary dan Julia Jary, 1991: 523).
- ⁴⁾ Menurut David Jary dan Julia Jary (1991: 531), *informant* adalah orang yang memberi jawaban atau informasi terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam kegiatan penelitian, sedang *key-informant* merupakan orang yang menjadi kunci dalam menginformasikan tentang orang yang memenuhi syarat sebagai informan dalam memberi informasi tentang kebutuhan data sesuai tujuan penelitian (sosial).
- ⁵⁾ Teknik pemilihan informan yang semula berasal dari teknik pemilihan sampel (*sampling technique*) dalam penelitian kuantitatif, yang dimulai dari wawancara dengan kelompok (*key informant*) kecil, kemudian *key informant* menunjuk kepada *informant* lain yang dipandang memiliki informasi seperti yang dibutuhkan dalam tujuan penelitian, jumlahnya kemudian membesar seperti bola salju yang menggelinding dari puncak gunung ke bawah, wawancara dengan informan kemudian diakhiri apabila data yang diperoleh sudah komprehensif, sesuai dengan tujuan penelitian (Mantra: 2004: 125).
- ⁶⁾ Balai Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) merupakan lembaga pemerintah di tingkat provinsi yang melayani urusan pekerja migran Indonesia.
- ⁷⁾ Menurut Halpern (2007: 3) modal sosial adalah sikap sa-saling berdekatan, berbagi, percaya, tolong-menolong, peduli sesama anggota dalam masyarakat yang dapat memberi kemanfaatan dan keuntungan bersama.
- ⁸⁾ Pekerjaan formal adalah yang digaji dengan sistem administrasi yang terskema dan terlembaga (perusahaan atau pabrik), sedang sektor informal adalah jenis pekerjaan yang sistem penggajinya tidak terskema secara administrasi kelembagaan, tetapi hanya bersifat perorangan dan di sektor domestik atau privat (*non-public sector*).
- ⁹⁾ Undang-undang No 39 tahun 2004 pasal 41 mensyaratkan pendidikan minimal bagi pekerja migran SMP.

- ¹⁰⁾ Latar belakang ekonomi penduduk Sumenep pelosok desa dan kepulauan yang kebanyakan petani kecil tidak memungkinkan mampu membayar biaya administrasi sebagai yang disyaratkan oleh PPTKIS sebagai agen resmi penempatan pekerja migran reguler)
- ¹¹⁾ Menurut Armour dan Vanclay (2003: 3) berbagai usaha ekonomi baru tersebut merupakan dampak positif dari eksistensi pekerja migran Sumenep.
- ¹²⁾ Sepanjang pengamatan, meskipun seorang suami atau istri yang ditinggal bekerja di Arab Saudi, mereka tetap disebut sebagai Jamal atau Dumal karena bermigrasi kerja sangat identik dengan pergi ke Malaysia.

Pustaka Acuan

- Abdurrahman, 1980, *Selayang Pandang Sejarah Madura*, <http://www.bangkalan-memory.net>.
- Berger, P.L. and Thomas Luckmann, 1966, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: Anchor.
- Blau, Peter. 1977. *Inequality and Heterogeneity: A Social Structure of Primitive Social Institution*. New York: Free Press.
- Brownlee, Kimberley. 2006. *The Communicative Aspects of Civil Disobedience and Lawfull Punishment*. Jurnal of Criminal Law and Philosophy. Volume I (2).
- Bryant, Lee. 2013. *Social Patterns*. Essex: Anglo-European School.
- Budi Harsono. 1992. *Metode Penelitian Ethique dan Emique dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Fisip Universitas Indonesia.
- Cholewinski, Ryszard. 2003. *Migrant Workers in International Human Rights Law: Their Protection in Countries of Employment*. Oxford: Clarendon Press.
- Crumlish, Christian and Erin Malone O'Reilly. 2013. *Social Patterns*. Media and Yahoo Press.
- de Jong, G.F. and Gardner, R.W. 1981. *Migration Decision Making*. New York: Pergamon.
- Durkheim, Emile. 1964. *The Division of labour in Society*. New York: Free Press.
- Farjon, I., 1980. *Madura and Surrounding Island: An Annotated Bibliografi*. Netherlands: Koninklijk Instituut voor Tall, Land en Volkenkunde.
- Febby Meilany. 2012. *Analisis Pola Pikir dan Tingkah Laku Pelajar di Era Globalisasi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Geertz, Clifford. 1977. *Penjaja dan Raja: Perubahan sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Halpern, David. 2007. *Social Capital*. Cambridge: Polity Press.
- Hastijanti, Retno, 2005. *Pengaruh Ritual Carok terhadap Pemukiman Tradisional Madura*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Hirschman, Albert. 1970. *Exit, Voice, and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organizations, and State*. Havard University Press.
- Ismani, 1978. *Kehidupan Orang Madura di Kota-kota Perantauan*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Istiana Hermawati. 2011. *Program Kelompok Usaha Bersama*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Jary, David and Julia Jary. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. Glasgow: Harper Collins Publisher.
- de Jonge, Huub. 1989. *Madura: dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam. Suatu studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: KITLV-LIPI dan Gramedia.
- Killias, Julia. 2010. *Illegal Migration as Resistance: Legality, Morality, and Coercion in Indonesian Domestic Workers Migration to Malaysia*. Journal of Social Science. 897-914.
- Koning, Juliette. 2004. *Generation of Change: Migration, Family Life, and Identity Formation in Javanese Life during the New Order*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koser, Khalid. 2007. *International Migration: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Lee, Everett. 1992. *Theory of Migration*. Yogyakarta: PPSK-UGM.
- Luckmann, Thomas and Berger, Peter L. 1967. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Achor Books-Garden City.
- Mantra, Ida Bagoes. 1995. *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia* (Makalah Seminar). Yogyakarta: PPSK-UGM.
- Massey, D.S. et al (a). 1993. *Theories of International Migration: A Review and Appraisal*. Oxford: Population and Development Review.
- Massey, D.S (b). 1998. *Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of Millennium*. Oxford: Clarendon Press.
- Massey, Douglas (c). 2004. *International Migration: Prospect and Policy in Global Market*. New York: Oxford University Press.
- Meliany, Febby. 2012. *Analisis Pola Pikir dan Tingkah Laku Pelajar*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Muhammad Gumarang, 2004. *Sampit bukan Poso, bukan pula Timor Timur*, Makassar: Yapensi.
- Parson, Talcott. 1960. *A Sociological Approach to the Theory of Organization*. New York: Free Press.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ritchev, P.N. 1976. *Explanation of Immigration*. Jurnal of Annual Review of Sociology, 2: 363-404.
- Ritzer, George, 1996. *Sociological Theory*. New York: The McGraw-Hill Companies.

- Rifa'I, Mien Ahmad, 2007. *Manusia Madura: Pem-bawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pan-dangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Rogers, Carl (a). 1961. *Communication: Its Blocking and Its Facilitation*. Boston: Houghton Mifflin.
- Scott, James C., 1993. *Resistensi Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James. 2009. *The Art of not Being Governed*. Yale: Yale University.
- Sugiyanto, 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Tainter, Joseph. 1990. *The Collapse of Complex Societies*. New York and Cambridge: Cambridge University Press.
- Tukiran, dkk. 2002. *Mobilitas Penduduk Indonesia, Tin-jauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Pusat Studi Kawaasan Kepnenedukan, Universitas Gadjah Mada.
- Turner, Jonathan, 1997. *The Institutional Order*. New York: Longman.
- Uhlenberg, P. 1973. *Non-economy Determinants of Non-migration: Sociological Consideration for Migration Theory*. Jurnal of Rural Sociology, 38 (3): 296-311.
- Vanclay, Frank. (2003). *Environmental and Social Impact Assessemment for Large Dams*. Australia: Charles Stuart University.
- Wiyata, A. Latief. (2008). *Kajian Antropologi mengenai Budaya Madura*. Madura Explore.
- Weber, Maxmilian. (1968). *Economy and Society*. New York: Bedminster Press.